

**EFEKTIVITAS KEBIJAKAN DANA DESA DALAM PEMBIAYAAN
PEMBANGUNAN EKONOMI DAN INFRASTRUKTUR
DESA PATTIRO KECAMATAN BANGKALA BARAT
KABUPATEN JENEPONTO**

SKRIPSI



**RAHMIATI
NIM : 105711104320**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2024**

KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA

JUDUL PENELITIAN:

**EFEKTIVITAS KEBIJAKAN DANA DESA DALAM PEMBIAYAAN
PEMBANGUNAN EKONOMI DAN INFRASTRUKTUR
DESA PATTIRO KECAMATAN BANGKALA BARAT
KABUPATEN JENEPONTO**

SKRIPSI

Disusun Dan Di Ajukan Oleh:

RAHMIATI

NIM : 105711104320

**Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Pada Program Studi Ekonomi
Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar**

**Program Studi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar
2024**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Sesungguhnya berserta kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (untuk urusan yang lain) dan hanya kepada tuhanmulah engkau berharap (Q.S. Al Insyirah: 6-8)

PERSEMBAHAN

Puji Syukur kepada Allah SWT atas Ridho-Nya serta karunianya sehingga skripsi ini telah terselesaikan dengan baik.

Alhamdulillah Rabbil'alamin

**Skripsi ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku tercinta
Orang-orang yang saya sayangi dan almamaterku**

PESAN DAN KESAN

Belajarlah jangan menjadi yang terbaik dari sekian banyak orang.
Tetapi jadilah orang yang bermanfaat baik dari sekian banyak orang.



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul :Efektivitas Kebijakan Dana Desa Dalam Pembiayaan
Pembangunan Ekonomi Dan Infrastruktur Desa Pattiro
Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto
Nama Mahasiswa : Rahmiati
No. Stambuk/NIM : 105711104320
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa penelitian ini telah diperiksa dan diujikan didepan panitia
penguji seminar hasil starta (S1) pada tanggal 25 Mei 2024 di program studi
ekonomi pembangunan fakultas ekonomi dan bisnis universitas muhammadiyah
makassar.

Makassar, 25 Mei 2024

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Muhammad Ikram Idrus, M.Si
NIDN: 0031126074

Ismail Rasulong, SE., M.M
NIDN: 0010026403

Mengetahui,

Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
NBM : 651 507

Ketua Program Studi

Asdar, S.E., M.Si
NBM: 115/132



**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama : Rahmiati, Nim : 105711104320 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan .Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 002/SK-Y/60201/091004/2024 M, Tanggal 16 Dzulqa'dah 1445 H / 25 Mei 2024 M. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

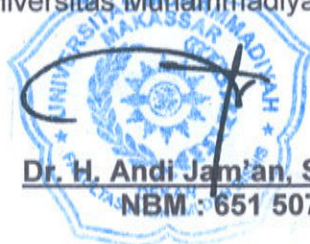
Makassar, 16 Dzulqa'dah 1445 H

25 Mei 2024 M

PANITIA UJIAN

- | | | |
|-------------------|--|--|
| 1. Pengawas Umum: | Prof. Dr. H Ambo Asse, M.A
(Rektor Unismuh Makassar) | (.....) |
| 2. Ketua | : Dr. H. Andi Jam'an, SE.,M.Si
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) | (.....) |
| 3. Sekretaris | : Agusdiwana Suarni, SE.,M.ACC
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis) | (.....) |
| 4. Penguji | 1. Dr. H. muhammad Ikram Idrus, M.Si
2. Hj. Naidah, SE., M.Si
3. Ismail Rasulong, SE.,M.M
4. A. Nur Achsanuddin UA, SE., M.Si | (.....)
(.....)
(.....)
(.....) |

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar



Dr. H. Andi Jam'an, SE.,M.Si
NBM : 651 507



**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar



SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Nama Mahasiswa : Rahmiati
No. Stambuk/ NIM : 105711104320
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Judul Skripsi : Efektivitas Kebijakan Dana Desa Dalam Pembiayaan
Pembangunan Ekonomi Dan Infrastruktur Desa Pattiro
Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 25 Mei 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Rahmiati
NIM : 105711104320

Diketahui Oleh:



Dekan

Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si,
NMB. 6511507

Ketua Program Studi



Asdar. S.E. M.S.i
NIDN: 128 6845

**HALAMAN PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahmiati
NIM : 105711104320
Program Studi : Ekonomi dan Pembangunan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Non-Exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah yang berjudul :

**Efektivitas Kebijakan Dana Desa Dalam Pembiayaan Pembangunan
Ekonomi Dan Infrastruktur Desa Pattiro Kecamatan Bangkala Barat
Kabupaten Jeneponto**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Makassar, 25 Mei 2024

Yang membuat pernyataan,



Rahmiati
NIM: 105711104320

KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada hentidiberikan kepada hamba-Nya. Shalawa beserta salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammda SAW beserta para keluarganya, sahabatdan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul **“Evektivitas Kebijakan Dana Desa Dalam pembiayaan Pembangunan Ekonomi Dan Infrastruktur Desa Pattiro Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto.”**

Skripsi yang penulis buat ini bertujuann untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan Terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Sumanto Dan Ibu Cuma Yang senantiasa memeberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus. Dan saudara-saudaraku tercintayang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, serta dukungan baik materi maupun moral, danda restu yang telah mereka berikan kepada penulis mnjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak.

Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terimakasih

banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Asdar, SE., M. Si selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. Muhammad Ikram Idrus, M. S. selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi selesai dengan baik.
5. Bapak Ismail Rasulong, SE., MM, selaku Pembimbing II telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenallelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Ekonomi Pembangunan yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongannya dalam aktivitas studi penulis
9. Terima kasih untuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan

dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Proposal ini.

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater tercinta Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fiiSabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.

Makassar, 25 Mei 2024

Rahmiati



ABSTRAK

RAHMIATI. 2024. Efektivitas Kebijakan Dana Desa Dalam Pembiayaan Pembangunan Ekonomi Dan Infrastruktur Desa Pattiro Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto. Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar dibimbing oleh: Muhammad Ikram Idrus dan Ismail Rasulong.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas kebijakan dana desa dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur di Desa Pattiro Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto. Serta untuk mengetahui bagaimana efektivitas penggunaan dana desa dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur di Desa Pattiro Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode Deskriptif Kualitatif. Data yang diolah adalah hasil wawancara dengan pemerintah desa Pattiro dan Masyarakat Desa Pattiro kemudian observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur menempati kategori efektif terlihat dari rasio efektivitas. Pemerintah Desa diharapkan agar lebih memaksimalkan pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan dan juga masyarakat turut serta dalam setiap pembangunan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan bahkan ikut terlibat dalam mengawasi sehingga pengolaan alokasi dana desa tepat sasaran serta pembangunan dapat berjalan optimal.

Kata kunci: Efektivitas, Kebijakan, Dana Desa, Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur.



ABSTRACT

RAHMIATI. 2024. Effectiveness of Village Fund Policy in Financing Economic Development and Infrastructure in Pattiro Village, West Bangkala District, Jeneponto Regency. Development Economics Study Program, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of Makassar, supervised by: Muhammad Ikram Idrus and Ismail Rasulong.

The aim of this research is to determine the effectiveness of village fund policies in economic and infrastructure development in Pattiro Village, West Bangkala District, Jeneponto Regency. As well as to find out how effective the use of village funds is in economic and infrastructure development in Pattiro Village, West Bangkala District, Jeneponto Regency. The type of research used is the Qualitative Descriptive method. The data processed is the result of interviews with the Pattiro village government and the Pattiro Village Community, then observation and documentation.

The results of this research show that the effectiveness of managing village fund allocation in economic and infrastructure development is in the effective category as seen from the effectiveness ratio. The Village Government is expected to maximize the management of village fund allocations in development and also for the community to participate in every village development, starting from planning, implementation and even being involved in monitoring so that the management of village fund allocations is right on target and development can run optimally.

Keywords: Effectiveness, Policy, Village Funds, Economic Development and Infrastructure.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI AKHIR	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II. Tinjauan Pustaka	9
A. Tinjauan Teori	9
1. Efektivitas	9

2. Dana Desa	10
3. Pembangunan Ekonomi	17
4. Infrastruktur	19
B. Tinjauan Empiris	20
C. Kerangka Konsep	26
BAB III. Metode Penelitian	27
A. Jenis Penelitian	27
B. Tempat Dan Waktu Penelitian	27
C. Jenis Dan Sumber Data	27
D. Teknik Pengumpulan Data	28
E. Teknik Analisis Data	28
BAB IV. Hasil Dan Pembahasan	30
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	30
1. Deskripsi Lokasi Penelitian	30
B. Penyajian Data (Hasil Penelitian)	37
C. Pembahasan	49
BAB V. Penutup	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	53
C. Novelty (Kebaharuan)	54
Daftar Pustaka	55
Lampiran	58

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tinjauan Empiris	20
Tabel 3.1 Tingkat Pengukuran Efektifitas	29
Tabel 4.1 Jumlah Dan Jenis Penerangan Rumah Tangga	35
Tabel 4.2 Kondisi Sarana Dan Prasarana	36
Tabel 4.3 Realisasi pendapatan Desa Pattiro Tahun 2018-2023	44
Tabel 4.4 Target Belanja dan Realisasi Desa Pattiro Tahun 2018-2023 ..	45



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konsep	26
Gambar 4.1 Peta Desa Pattiro	30
Gambar 4.2 Struktur Pemerintahan Desa Pattiro	33



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pertanyaan Wawancara

Lampiran 2 Kuesioner Penelitian

Lampiran 3 Karakteristik Responden

Lampiran 4 Jawaban Responden

Lampiran 5 Uji Validitas Dan Reliabilitas

Lampiran 6 Uji Frekuensi

Lampiran 7 Surat Izin Penelitian

Lampiran 8 Dokumentasi

Lampiran 9 Biografi Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri dari banyak wilayah yang mana tiap-tiap wilayahnya di pimpin oleh pemimpin daerah yang berbeda-beda. Ilayah dengan pemerintahan yang paling rendah yaitu Desa, untuk Desa sendiri, pemerintah Indonesia telah memiliki Undang- undang yang mengaturnya yaitu Undang- undang Nomor 22 tahun 1999 yang telah di revisi melalui undang- undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Desa.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan juga merupakan negara ke 4 terbesar dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, sehingga Indonesia sering dihadapkan dengan berbagai masalah sosial antara lain seperti, kemiskinan dan kurangnya infrastruktur. Masalah kurangnya infrastruktur dan kemiskinan di Indonesia paling relatif banyak terdapat di pedesaan, khususnya daerah terpencil dan tertinggal yang paling merasakan permasalahan ini. Hal tersebut bertolak belakang dengan pembukaan Undang- Undang Dasar (UUD) 1945 yang salah satunya mengamanatkan bahwa "Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa". Yang artinya bahwa kemiskinan merupakan tanggungjawab Negara, yang dimaksud disini adalah pemerintah negara itu sendiri. Untuk membantu mewujudkan kesejahteraan rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka perlu adanya sarana yang dapat mendukungnya seperti infrastruktur.

Desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat serta urusan pemerintahan berdasarkan undang-undang, asal-usul dan adat istiadat masyarakat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI (Sari et., 2020). Hal tersebut menyebabkan bertambahnya beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun demikian penyelenggaraan pemerintah tersebut tetap harus di pertanggung jawabkan.

Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah pertanggungjawaban dalam Pengelolaan dana desa (Nurlailah et al., 2019). Alokasi dana desa dapat dikatakan efektif apabila sistem pengelolaan yang dilakukan pemerintah desa, manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat desa (Sumianto, 2018). Dalam pelaksanaannya pembangunan desa mengacu pada pencapaian tujuan pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan.

Pembangunan pedesaan harus dilihat sebagai upaya mempercepat pembangunan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk memberdaya masyarakat, dan upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kokoh. Munculnya Undang-Undang No 6, 2014) tentang Desa memberikan keleluasaan kepada Kepala Desa untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian kebijakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa.

Jenis pembangunan desa terbagi menjadi dua yaitu pembangunan fisik desa dan pembangunan non fisik desa, namun pemerintahan Marihat baris lebih memfokuskan untuk melakukan pembangunan non fisik, karena pembangunan tersebut dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari 21 Kabupaten, 3 kota, 307 Kecamatan, 792 Kelurahan dan 2.255 Desa. Jeneponto merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Salah satu Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Jeneponto yang memperoleh dana desa adalah Kecamatan Bangkala Barat. Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto adalah Kecamatan yang terbagi atas tujuh (7) desa. Masing-masing desa dikelola oleh kepala desa, karena kepala desa langsung bertanggungjawab kepada camat. Kantor Kecamatan Bangkala Barat salah satu kantor pemerintahan yang bergerak di bidang pelayanan masyarakat. Dimana kantor ini melayani masyarakat dalam rangka untuk mewujudkan pembangunan pada masyarakat yang adil dan makmur. Kantor Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto juga berhak mengatur dan mengelola dana desa dalam rangka meningkatkan pembangunan desa.

Banyak pihak yang khawatir dana desa tersebut disalahgunakan, bukannya dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa

malah akan menjadi lahan aparaturnya untuk melakukan tindak pidana korupsi. Untuk mencegah hal ini terjadi aparaturnya perlu diberikan pelatihan dan tentunya pengawasan agar lebih mempersempit ruang penyalahgunaan dana desa tersebut. Agar dana desa tepat sasaran dan tidak disalahgunakan maka menteri desa dan pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi mengeluarkan Permendes Nomor 21 Tahun 2016 tentang penempatan prioritas pembangunan dana desa tahun 2016. Peraturan menteri tersebut berisi tentang dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Prioritas belajar desa disepakati dalam musyawarah desa dan hasil musyawarah tersebut menjadi acuan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes).

Masyarakat memiliki peran yang cukup penting dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa, yang mana masyarakat menjadi komponen utama Desa itu sendiri, dan merupakan pihak yang memiliki hak untuk mengambil keputusan, sebagaimana yang kita ketahui, aspirasi dan saran yang diberikan masyarakat sangat penting dalam sebuah kegiatan. Selain itu juga tujuan dari kegiatan alokasi Dana Desa adalah kegiatan yang memberikan manfaat dan pemenuhan kebutuhan masyarakat Desa. Kerja sama sangat dibutuhkan dalam kegiatan ini untuk memperoleh hasil yang maksimal yaitu kerjasama antara pemerintah Desa dan masyarakatnya. Dengan adanya kerjasama, mudah untuk mencapai ideal di tiap-tiap tahapan kebijakan

Dana Desa yang nantinya akan dilakukan. Pastinya apabila nanti kegiatan tersebut berjalan semestinya, masyarakat memiliki peluang yang cukup besar untuk mengembangkan kemampuan mereka dalam mendorong kemajuan Desa serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Salah satu cara untuk memperkuat perekonomian dipedesaan adalah dengan memperbaiki infrastruktur pedesaan tersebut yang bertujuan untuk memperbesar potensi yang ada dan menjadikan pedesaan sebagai tulang punggung ekonomi regional dan nasional. Pembangunan pedesaan bersifat multiaspek. Karna itu perlu dilakukan analisis secara lebih terarah serta keterkaitan dengan bidang sektor dan aspek diluar pedesaan (fisik dan non fisik, ekonomi dan non ekonomi, sosbud, dan non spasial).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada camat Kecamatan Bangkala Barat, diketahui bahwasanya pemerintah desa mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat desa dalam bermusyawarah untuk perencanaan pembangunan desa, hal ini tentu saja sangat jelas di atur dalam undang-undang, pemerintah setempat mengikutsertakan tidak hanya masyarakat saja, bahkan pemerintah desa juga melibatkan organisasi-organisasi yang ada di desa tersebut.

Berdasarkan pengalokasian dana desa setiap kabupaten/kota diatur dalam pasal 11 bahwa dana desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah desa, dan dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar, dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis

desa setiap kabupaten. Berdasarkan rician alokasi dana Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 mendapat Rp 210.185.472.712, - dana desa, dana tersebut akan dikelola untuk 114 desa yang terdapat di Kabupaten Jeneponto.

Desa Pattiro atau yang lebih dikenal desa penghasil garam dan makanan tradisional lammang merupakan salah satu dari beberapa desa yang terletak di wilayah sebelah Barat Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten. Jeneponto. Saat ini Desa Pattiro dipimpin oleh Bapak Jamaluddin S.Pd untuk Desa Pattiro merupakan salah satu desa dari 114 desa di Kabupaten Jeneponto yang dimana dana desa Pattiro mengantongi kisaran anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000 Dengan adanya kisaran anggaran dana desa seharusnya memberikam dampak yang positif dalam pembangunan ekonomi, terutama pada desa Pattiro selaku salah satu penerima dana desa terbanyak. Efektivitas kebijakan Dana Desa dalam pembangunan dapat berhasil apabila tata Kelola pembangunan didasari pada empat indikator yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan transparasi, Dana tersebut digunakan pembangunan jalan, irigasi, penataan lingkungan, dan pembangunan kantor desa.

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan penulis tertarik untuk meneliti tentang penggunaan dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat. Mengingat setiap desa memperoleh milyaran rupiah dan diharapkan dengan adanya dana desa tersebut dapat membawa dampak positif bagi ekonomi dan infrastruktur desa. Dan yang menjadi daerah penelitian adalah

desa Pattiro Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto. Maka penulis mengangkat hal ini dalam bentuk Proposal yang berjudul **“Efektivitas Kebijakan Dana Desa Dalam pembiayaan Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur Desa Pattiro Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka topik rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana efektivitas kebijakan dana desa dalam pembiayaan pembangunan ekonomi dan infrastruktur Desa Pattiro, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menjelaskan efektivitas dana desa dalam pembiayaan pembangunan ekonomi dan infrastruktur di Desa Pattiro Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam pengembangan konsep perencanaan pembangunan ekonomi dan infrastruktur desa. Selain itu juga untuk

pengembanganteori- teori yang membahas mengenai perencanaan pembangunan.

2. Secara Praktis Dari segi praktis, penelitian ini dilakukan untuk diharapkan dapat menjadi wawasan baru baik bagi mahasiswa tentang perencanaan pembangunan ekonomi dan infrastruktur desa dalam tataran kehidupan mahasiswa, terutama dalam pembahasan perencanaan pembangunan yang merupakan hal menarik untuk diteliti seperti memberikan wawasan pengetahuan tentang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur Desa Berdasarkan Kondisi Dan Potensi Wilayah Desa Pattiro Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto 2023.
3. Sebagai tambahan kajian ilmiah dan sumber pertimbangan bagi pemerintah Desa Pattiro Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto.

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Efektivitas

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata efektif berarti dapat membuahkan hasil, mulai berlaku, ada pengaruh, akibat atau efektififnya. Efektivitas juga dapat diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan- tujuan.

Efektivitas pada umumnya sering dihubungkan dengan efisiensi dalam mencapai tujuan. Efektif menurut Peter F. Drucker dikutip dari Sadono Sukirno (2004) adalah mengerjakan pekerjaan dengan benar. Dan dijelaskan bahwa efektif merupakan ukuran prestasi manajemen dalam kegiatan-kegiatan yang diperlukan agar sasaran organisasi tercapai. Artinya sejauh mana para manager mencapai sasaran-sasaran organisasi merupakan ukuran dalam menilai bagaimana manajer tersebut telah menjalankan kegiatannya secara efektif (Agus *et.al*, 2021).

Amelia (2018) juga berpendapat bahwasanya efektivitas digambarkan sebagai kegiatan untuk melihat apakah tujuan dari suatu organisasi dapat tercapai tidaknya dengan menggunakan ukuran hitung, kondisi ini tentunya menghasilkan dua arah, yang pertama adalah apabila suatu organisasi mampu mencapai tujuannya maka kegiatan yang berlangsung di dalamnya dapat dikatakan efektif.

Ravinto (2014:11) menyatakan bahwa efektivitas adalah seberapa

baik pekerjaan dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan output seperti yang diharapkan. Artinya, jika suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, dan kualitas, itu bisa dikatakan efektif. Untuk mengetahui efektivitas suatu kegiatan diperlukan pengetahuan tentang cara mengukur efektivitas. Menurut Anggi Rahajeng dalam Citra (2022) efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai kegiatan yang telah ditetapkan. Pengukuran efektivitas mengukur hasil akhir dari suatu pelayanan dikaitkan dengan output-nya (cost of outcome).

Menurut Mardiasmo (2017: 134) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (Output) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi (Lestari *et.al*, 2020).

2. Dana Desa

a. Pengertian Dana Desa

Menurut peraturan Menteri keuangan tentang tentang cara

pengealokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi Dana Desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/ Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat

b. Tujuan Dana Desa

Pada dasarnya program pemerintah harus memiliki tujuan yang jelas dan memberi pengaruh yang baik kepada masyarakat. Pada hakekatnya tujuan umum dari pembangunan pedesaan adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan melalui pencapaian kemajuan sosial dan ekonomi secara berkesinambungan dengan tetap memperhatikan persamaan hak dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan bagi masyarakat secara keseluruhan (Sumenep, 2024).

Secara singkat dapat dikemukakan bahwa tujuan pembanguana secara luas adalah peningkatan perbaikan kualitas hidup masyarakat secara multidimensional.

Tujuan Dana Desa daro Kementrian keuangan RI yaitu:

- a) Meningkatkan pelayanan
- b) Mengatasi kemiskinan
- c) Memajukan perekonomian Desa
- d) Mengatasi kesenjangan pembangunan Desa
- e) Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan

c. Sumber Dana Desa

Melalui undang-undang Desa, Desa telah diperkuat kewenangannya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain diperkuat kewenangannya, Desa juga diberikan sumber-sumber pendapatan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 Ayat (1), Pendapatan Desa Bersumber dari;

- a) Pendapatan asli Desa, Hasil Usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa
- b) Dana Desa dari APBN
- c) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kab/Kota (paling sedikit 10%)
- d) Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kab/Kota (minimal 10% dari Dana Bagi hasil Dana Alokasi Umum)
- e) Bantuan keuangan dari APBD Prov dan APBD Kab/Kota
- f) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga
- g) Lain-lain pendapatan Desa yang sah

d. Pengawasan Dana Desa

Pengawasan yang berasal dari desa dilakukan oleh BPD dan

Masyarakat desa. Kecamatan akan melakukan monitoring semua desa dalam penggunaan dana desa. Inspektorat yang berasal dari Kabupaten akan melakukan audit setiap tahunnya. Begitu juga dengan BPK yang berasal dari pusat akan melakukan audit setiap tahunnya. Anggaran dana desa yang berlebih setiap tahunnya atau yang sering disebut dengan sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahunan Berjalan (SILPA) tidak dapat digunakan pada tahun berjalan.

Pemerintah pusat melakukan sinergi antar kementerian maupun dengan daerah dalam rangka pelaksanaan pengawasan Dana Desa secara berjenjang dengan melibatkan partisipasi masyarakat, aparat pengawas di daerah sampai dengan KPK.

- a) Masyarakat
- b) Camat
- c) BPD/DPMD
- d) ADIP
- e) BPK
- f) KPK

e. Peraturan Dana Desa

Adapun peraturan dana Desa sebagai berikut:

- a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- b) Peraturan pemerintah No.60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang bersumber dari APBN

- c) Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari APBN.
- d) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No.1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Usuk dan Kewenangan Lokasi Berskala Desa.
- e) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Trasmigrasi Republik Indonesia No.3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa.
- f) PERaturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
- g) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Dan Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- h) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.
- i) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 6 Tahun 2015 24 Tentang

Organisasi Dan Tata Kerja Kementrian Desa , pembangunan daerah tertinggi dan transmigrasi

- j) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.

f. Prinsip-prinsip Dalam Penggunaan Dana Desa

Dalam pelaksanaan penggunaan dana desa maka harus memperhatikan prinsip-prinsip dibawah ini:

- a) Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan.
- b) Kebutuhan proitas, dengan mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagai besar masyarakat desa.
- c) Tipologi desa, dengan memperhatikan keadaan dan kenyataan karakteristik, geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan antara perkembangan dan kemajuan desa.

g. PertanggungJawaban Dana Desa

Pertanggungjawaban dana desa tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa yang menjaditanggung jawab kepala desa sebagai pemegang kuasa pengelolaan keuangan desa. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban ditetapkan dengan peraturan desa, dan dilampiri:

- a) Format laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan
- b) Format laporan kekayaan milik per 31 Desember tahun anggaran berkenaan dan
- c) Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk kedesa.

h. Mekanisme Dan Tahap Penyaluran Dana Desa

Penyeluran dana desa meliputi dua tahap yaitu penyaluran dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan dari RKUD ke Rekening Kas Daerah (RKD). Penyaluran dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Tahap I pada bulan maret sebesar 60% (enam puluh persen)
- 2) Tahap II pada bulan agustus sebesar 40% (empat puluh persen)

Penyaluran dana desa dari RKUN ke RKUD tahap I dilakukan setelah Direktur Jendral Perimbangan Keuangan menerima peraturan daerah mengenai APBD kabupaten/kota tahun anggaran berjalan, tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa dan laporan realisasi penyalurandan konsolidasi penggunaan dana desa tahun anggaran sebelumnya dari Bupati/Walikota.

Penyaluran dana desa tahap II dilakukan setelah menteric.q. Direktur Jendral Perimbangan Keuangan menerima laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa tahap I dari bupati/walikota yang menunjukkan paling kurang 50% Penyaluran dana desa tahap I dari RKUD ke RKD dilaksanakan oleh bupati/walikota, setelah

menerima dari kepala desa.

3. Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi merupakan sebuah proses kenaikan pendapatan secara total dan maksimal, pendapatan perkapita penduduk dengan memperhitungkan bertambahnya penduduk serta ada perubahan yang fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk dalam jangka waktu yang panjang. Secara ringkas, pembangunan ekonomi juga dapat di artikan sebagai proses yang menyebabkan pendapatan perkapita suatu penduduk dalam sebuah negara meningkat dalam jangka waktu yang panjang (Prasetya dan Kusumawati, 2024).

Menurut Nugroho dkk (2004) pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang dengan perubahan ciri- ciri penting suatu masyarakat, yaitu perubahan yang baik dalam hal teknologi, pola pikir masyarakat maupun kelembagaan.

1. Adam Smith Untuk berlangsungnya perkembangan ekonomi diperlukan adanya spesialisasi atau pembagian kerja agar produktivitas tenaga kerja bertambah. Spesialisasi dalam proses produksi akan dapat meningkatkan keterampilan tenaga kerja, akan mendorong ditemukannya alat-alat atau mesinmesin baru dan akhirnya dapat mempercepat dan meningkatkan produksi.
2. Menurut David Ricardo David Ricardo dengan teori ricardian menulis

dalam bukunya *The principles of political Economy and the Taxation* pada tahun 1823-1912. David Ricardo dalam analisisnya mengenai proses terjadinya pertumbuhan ekonomi menjelaskan bahwa pada awalnya jumlah penduduk sangat rendah dan kekayaan alam masih melimpah. Pada keadaan seperti ini para pengusaha dalam menjalankan usahanya dengan menggunakan kekayaan alam sebagai faktor produksi mengakibatkan para pengusaha dapat memperoleh keuntungan yang tinggi. Dengan tingkat keuntungan yang tinggi itu dapat mempertinggi modal yang dimiliki yang selanjutnya dapat menaikkan produktivitas tenaga kerja. Dalam perkembangan selanjutnya dengan adanya kenaikan tingkat produktivitas ini para pekerja mulai menuntut tingkat upah yang tinggi.

Pada tingkat upah yang tinggi mengakibatkan penduduk bertambah sedangkan luas lahan tetap dengan demikian mutu tanah juga mulai menurun, sewa tanah semakin tinggi mengakibatkan pendapatan menurun yang selanjutnya mengakibatkan tingkat keuntungan para pengusaha menjadi berkurang, permintaan tenaga kerja berkurang, upah turun. Begitu terus sampai tingkat upah menjadi minim. Dalam keadaan seperti ini dilakukan dalam kondisi *stationary state* atau perekonomian dalam keadaan statis. Ricardo membagi masyarakat dalam tiga golongan yaitu:

- a. Masyarakat pekerja atau buruh
- b. Masyarakat pengusaha atau kapitalis
- c. Tuan tanah atau bangsawan

Infrastruktur

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 38/ 2015 mendefinisikan infrastruktur sebagai salah satu teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat serta mendukung jaringan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik. Prasetyo dan Firdaus (2009) membagi infrastruktur menjadi 3 yaitu :

- a. Infrastruktur ekonomi, infrastruktur dalam bentuk nyata atau fisik untuk menunjang aktivitas ekonomi, publik, utilities berupa tenaga, gas, air, telekomunikasi, sentiasa dan publik work berupa irigasi, jalan, drainase, bendungan serta untuk sektor transportasi berupa jalan, pelabuhan dan seterusnya.
- b. Infrastruktur sosial dapat berupa perumahan, kesehatan dan pendidikan.
- c. Infrastruktur administrasi dapat berupa koordinasi dan penegakan hukum.

Sebagai kebutuhan dasar fisik, infrastruktur memerlukan pengorganisasian sistem struktur untuk jaminan ekonomi di sektor publik dan sektor privat sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan berupa infrastruktur fisik dan sosial agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik.

B. Tinjauan Empiris

Beberapa penelitian tentang Dana Desa yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah dan skripsi ekonomi yang menjadi

Table 2.1 Tinjauan Empiris

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variable	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1	Eko Supralianto putra dan dahlia 2019	Efektivitas kebijakan dana desa dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur di desa batu belerang kecamatan sinjai borong kabupaten sinjai.	Efektivitas, Pembangunan Ekonomi Dan Infrastruktur	Statistik Deskriptif	Dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur Desa Batu Belerang juga melibatkan masyarakat setempat dan juga dalam pelaksanaannya sesuai dengan undang-undang dana desa. Maka dari itu kebijakan dana desa dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur Desa Batu Belerang dapat dikatakan efektif
2	Dwi hidayanti 2022	Efektivitas kebijakan dana desa dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur desa (studi kasus desa sindu agung kecamatan mangkutana kabupaten luwu timur)	Pembangunan Ekonomi (X1), Pembangunan Infrastruktur (X2), Efektivitas	Statistik Deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan dana desa dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur menempatai kategori efektif.

			Dana Desa (Y)		
3	Milikiachristi tumiwai, Daisy dan Wensy 2021	Efektivitas kebijakan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa kolongan satu Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa	Efektif, Pembangunan, Dan Dana Desa	Statistik Deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan desa kolongan satu dari tahun 2015-2020 efektif dan berhasil. Hal tersebut terbukti dalam perhitungan rumus yang mencapai 100% dan itu dinyatakan Efektif.
4	Benny syahputra nasution, Budi hartono, Isnaini/2023	Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan infrastruktur kampung medang ara kecamatan karang baru kabupaten aceh tamiang		Statistik Deskriptif	Hasil penelitian didapatkan dari segi komunikasi antara pegawai dan aparat pemerintah desa sudah baik, namun sosialisasi kepada masyarakat meningkat. Dalam pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia dan material kurang memadai karena kurangnya tenaga pelaksana, serta sarana dan prasarana. Penggunaan anggaran alokasi dana desa dapat diselesaikan dengan baik namun kurangnya transparansi informasi menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat

					sehingga target pengalokasian dana tidak tercapai.
5	Pawer darasa panjaitan, Darwin damanik/2022	Efektivitas kebijakan dana desa bagi pembangunan ekonomi pedesaan di kecamatan harian kabupaten samosir	Pengelolaan Dana Desa (X), Pembangunan Dana Desa (Y)	Statistik Deskriptif	Hasil yang diperoleh responden menyatakan bahwa dana desa yang disalurkan dari pemerintah cukup untuk pembangunan desa, keberadaan dana desa sangat membantu pembangunan desa, penggunaan dana desa terbesar digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan pertanian, dan pemberdayaan masyarakat dana desa. dalam pelaksanaannya pemerintah desa menginformasikan setiap pengeluaran dan pemasukan dana melalui spanduk dan dipasang di depan kantor kepala desa.
6	Galih Wicaksono 2018	Efektivitas pengelolaan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten bondowoso		Statistik Deskriptif	Hasil penelitian ini adalah secara umum desa yang berada di Kabupaten Bondowoso telah melakukan Pengelolaan keuangan desa secara baik, namun pada hal tertentu

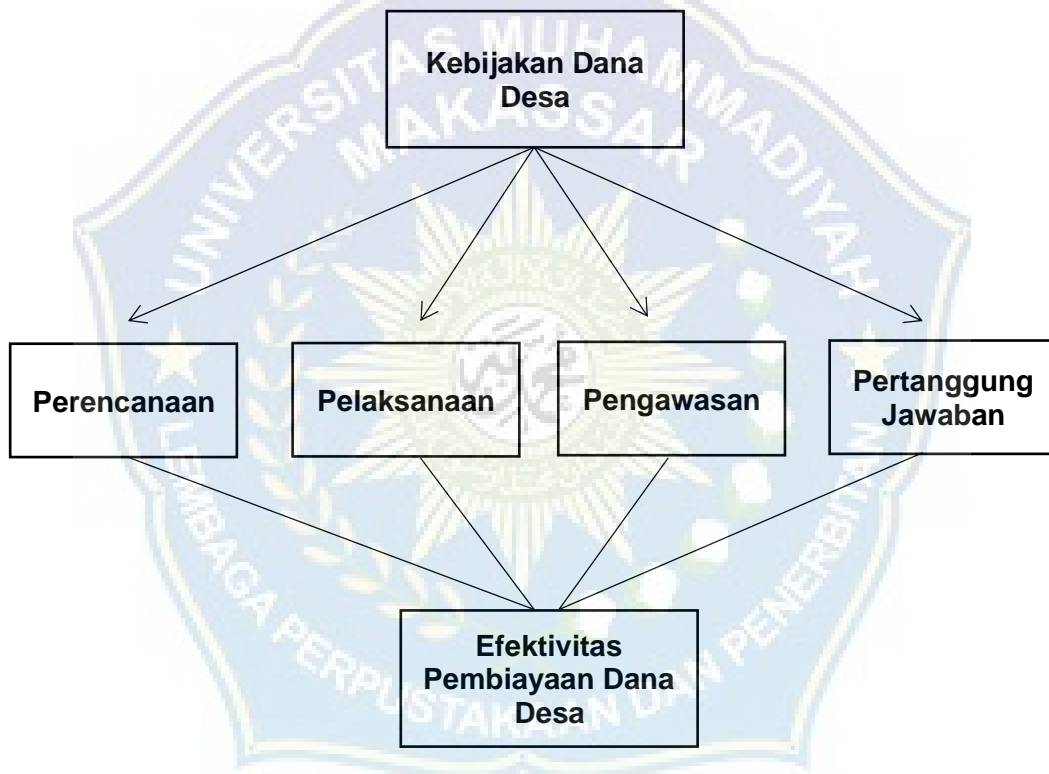
					masih belum tertib dalam administrasi, sehingga terkadang mengalami keterlambatan dalam pencairan keuangan Desa untuk periode berikutnya. Pembahasan dan implikasi temuan di bahas dalam artikel.
7	Fhatimatus Zehroil Batul 2018	Efektivitas Kebijakan dana desa dalam meningkatkan Pembangunan di desa Tegalrejo Kecamatan Gondong Kabupaten Sragen	Efektivitas, Dana Desa Dan Pembangunan	Statistik Deskriptif	Tepat Target, bahwa pembangunan yang dilakukan telah sesuai dengan target di APBDes. Tepat Lingkungan, koordinasi yang dilakukan pemerintah desa Tegalrejo dengan masyarakat dan pemerintah kota/kabupaten Sragen telah baik. Serta di lingkungan eksternal kebijakan media massa telah memberikan informasi terkait pembangunan-pembangunan di Desa Tegalrejo. Sedangkan di Tepat Proses, Pemerintah kabupaten/kota, kecamatan hingga desa sudah memahami maksud dan tujuan kebijakan Dana Desa. Kebijakan Dana Desa ini diterima dan

					dilaksanakan sesuai dengan tujuan dari kebijakan dana desa.
8	Moeljono 2019	Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa tegal arum kecamatan mranggen Kabupaten Demak	Perencanaan ,Penganggaran Desa	Statistik Deskriptif	Hasil pengamatan menunjukkan bahwa efektifitas pengelolaan alokasi dana desa dimana ada tiga tahap yakni perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Secara administrasi ketiga tahap tersebut dapat terselesaikan dengan baik dan memenuhi prinsip efektif yang di indikatori adanya transparansi informasi kepada masyarakat.
9	Yuli Rusmawati, IAIN Tulungagung 2020	Efektivitas Pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan di desa kandang kecamatan srengat kabupaten blitar	Efektivitas ,Pengelolaan, Dana Desa Dan Pembangunan	Statistik Deskriptif	Hasil penelitian menyatakan bahwa (1) Pengelolaank Dana Desa (DD) di desa kandang telah baik. Hal ini dapat dilihat dari pengelolaan dana desa meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. pengelolaan dana desa di desa kandang telah efektif. Hal ini dapat dilihat dari tercapainya

					tujuan pembangunan dan adanya kepuasan masyarakat terhadap pembangunan yang dilakukan bahwa pembangunan yang dilaksanakan telah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakat ikut terlibat dalam kegiatan Pembangunan yang dilakukan melalui adanya musyawarah dusun dan musyawarah.
10	Majon Kinaro 2020	Efektivitas Pengelolaan dana desa dalam Pembangunan Infrastruktur Di desa Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar	Efektippitas, Pengolaan Dana Desa Dan Infrastruktur	Statistik Deskriptif	Pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur di desa kajhu dimulai dari perencanaan dan pelaksanaan sudah berjalan dengan efektif,

C. Kerangka Konsep

Pada gambar dibawa dapat diuraikan mengenai kebijakan efektivitas penggunaan dana desa dalam pembiayaan pembangunan ekonomi dan pembanguna infrastruktur. Sehingga tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk melihat seberapa efektif penggunaan dana desa dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.



Gambar 2.1 Kerangka Konsep

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif secara kuantitatif (Sugiyono, 2019). Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta ciri-ciri dan hubungan antara fenomena yang di teliti menggunakan pendekatan penghitungan angka-angka.

B. Tempat Dan Waktu Penelitian

Pelaksanaan Penelitian ini dilakukan di Desa Pattiro, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto. Adapun waktu penelitian yaitu pada April sampai Mei 2024

C. Jenis Dan Sumber Data

Data dan informasi mengenai efektivitas dana desa dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur Desa Pattiro Kecamatan Bangkala Barat di Kabupaten Jeneponto didasarkan pada cara memperolehnya, yaitu dengan data sekunder.

a. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat secara langsung dari objek penelitian. Peneliti menggunakan data yang telah jadi yang dikumpulkan dari pihak lain data sekunder ini berupa bukti, catatan atau laporan historis yang sudah tersusun dalam arsip atau data dokumentasi.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian bersumber dari data sekunder.

Data yang dikumpulkan berupa data berkala (time series data / yang diambil dari anggaran pendapatan dan belanja desa Pattiro, Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto dari tahun anggaran 2018 – 2023.

Data dokumentasi yang diperoleh adalah berupa realisasi belanja dan target belanja yang berkaitan dengan Pembangunan ekonomi dan infrastruktur desa Pattiro, Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara
2. Dokumentasi

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui pencatatan dan perekaman data dan atau dokumentasi tertulis dari laporan pendapatan dan belanja Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto, pemerintah desa Pattiro berupa laporan keuangan.

E. Teknik Analisis Data

Metode Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penghitungan kuantitatif untuk mengetahui efektifitas kebijakan pengelolaan anggaran Pembangunan desa untuk kepentingan pembangun ekonomi dan infrastruktur, yaitu dengan formulasi seperti yang dilakukan oleh (Mahsum, 2018).

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Target Belanja}} \times 100\%$$

- Efektifitas suatu argumentasi dikatakan baik apabila hasil dicapai 100% dan akan lebih baik lagi Ketika mampu memperoleh nilai rasio lebih besar dari 100%.
- Rasio efektifitas digunakan untuk memudahkan dalam memberikan simpulan dari penghitungan yang sudah dilaksanakan lewat analisis efektifitas.
- Kriteria rasio efektifitas yang digunakan, yaitu dibawah ini adalah presentase untuk mengukur nilai efektifitas dalam presentase:

Tabel: 3.1 Tingkat Pengukuran Efektifitas

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

Sumber: Sidik (1994) dalam Enggar *et.al*

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Deskripsi Lokasi Penelitian

a. Sejarah Desa Pattiro

Desa Pattiro merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto dengan luas wilayah \pm 7,49 Ha. Luas ini terdiri atas lahan persawahan, perkebunan dan perikanan/kelautan. Adapun batas-batas wilayahnya sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Bulu jaya Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Banrimanurung Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pallantikang Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Banrimanurung.



Gambar 4.1 Peta Desa Pattiro

Jarak Desa Pattiro dari ibukota kabupaten \pm 33 Km dengan jarak

tempuh 1Jam dengan menggunakan angkutan umum, sedangkan jarak dari kecamatan \pm 5 Km dengan jaraktempuh 20 menit dengan menggunakan kendaraan roda dua (motor).

b. Visi Dan Misi Desa Pattiro

Bersamaan dengan penetapan RPJM Desa Pattiro, dirumuskan dan ditetapkan juga **Visi Desa Pattiro**:

”Membangun Desa Pattiro Menjadi desa yang Mandiri,cerdas,adil,sejahtera serta menciptakan suasana yang kondusif dalam ruang lingkup desa dan terbuka dalam pengambilan keputusan yang bersifat kebersamaan dan semangat gotong royong (A’bulo sibatang)”

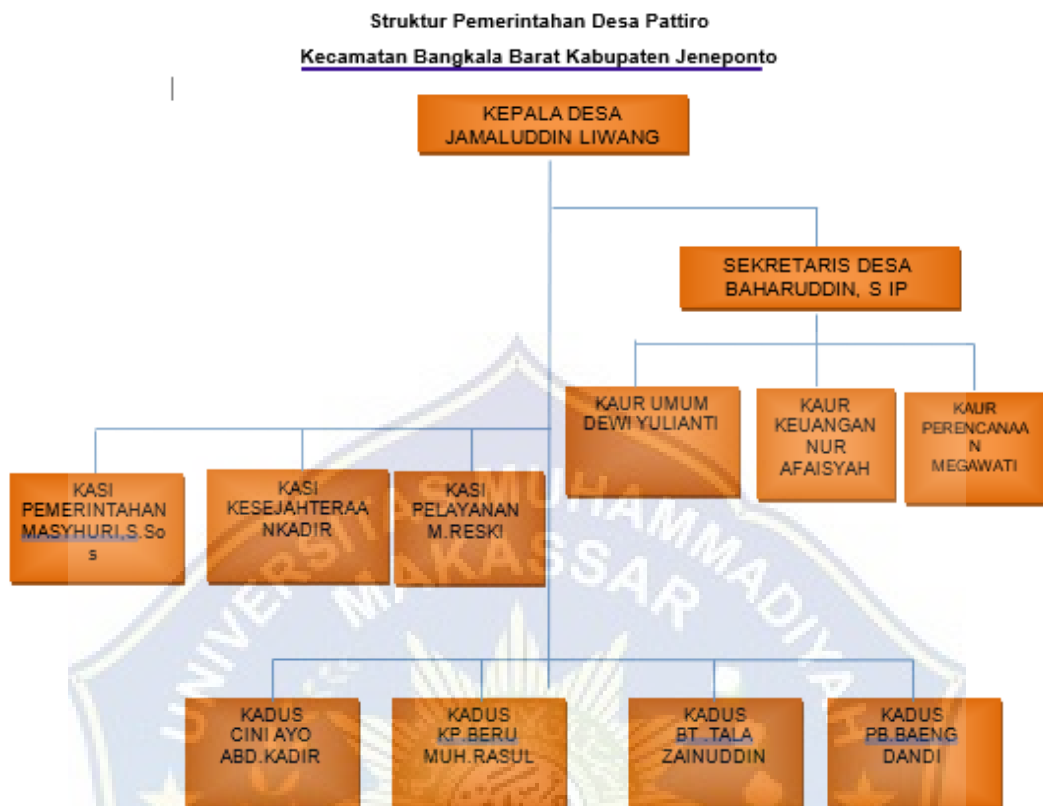
Dalam meraih Visi Desa Pattiro seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal. Maka disusunlah

Misi Desa Pattiro :

1. Pembangunan badan usaha Desa dan pengembangan badan usaha milik Desa yang telah ada dalam bidang pertanian, perkebunan dan perekonomian, sehingga tercapai sebuah Desa yang mandiri
2. Peningkatan mutu pendidikan masyarakat desa dalam hal peningkatan ahlak dan moral, sehingga akan tercapai masyarakat yang berpendidikan dan cerdas dalam menentukan peningkatan mutu dari Desa itu sendiri.

3. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional dan memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan sehingga tercapai sebuah kemakmuran desa dan masyarakat Desa
4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama dan meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum
5. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka atau transparan serta bertanggung jawab Dalam pengambilan keputusan selalu bersifat keterbukaan serta mempertimbangkan semangat kebersamaan dan semangat gotong royong (*A' bulo Sibatang*)

c. Struktur Organisasi Desa Pattiro



Gambar 4.2 Struktur Pemerintahan Desa Pattiro

d. Sarana Prasarana Desa Pattiro

1. Transportasi

Prasarana transportasi darat merupakan prasarana yang dapat mempercepat kegiatan ekonomi karena tersedianya transportasi berimplikasi pada kelancaran distribusi barang dan jasa. Pembangunan jalan akan meningkatkan aksesibilitas penduduk dan sumber daya ekonomi masyarakatnya, membangkitkan ekonomi lokal menunjang produksi pangan dan membantu menyatukan komunitas yang terpencil ke dalam perekonomian yang lebih luas. Pada tahun 2009 semua jalan sudah diaspal baik jalan propinsi mau jalan ke dusun-dusun namun sekarang ini

kondisi jalan khususnya jalan dusun sudah mulai rusak yang mengakibatkan jalur transportasi tidak lancar.

2. Angkutan

Untuk sarana angkutan yang digunakan di Desa Pattiro baik antar desa maupun ke kecamatan dan kabupaten umumnya masyarakat menggunakan angkutan umum roda empat seperti pete-pete. Selain itu, masyarakat jugamenggunakan angkutan roda dua seperti ojek.

3. Sarana Utilitas (listrik Dan Air Minum)

Energi listrik untuk masa sekarang merupakan energi yang sangat vital dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sampai dengan tahun 2016, listrik belum memadai di desa Pattiro khususnya di dusun Paebaeng baeng,Dusun bontotala Bagi masyarakat yang memiliki kemampuan finansial, maka mereka menggunakan tenaga Listrik sebagai sumber penerangan dengan pembayaran perbulan ratusan ribuan rupiah perumah tangga sedangkan bagi masyarakat yang kurang mampu menggunakan pelita. Akibat penerangan yang belum memadai, maka kerawanan sosial sering terjadi di kedua dusun tersebut, seperti pencurian ternak. Untuk dusun pa'baeng- baeng listrik sudah masuk tapi masyarakat masih melakukan penyambungan bagi yang belum memiliki meteran sendiri.

Tabel 4.1 Jumlah Dan Jenis Penerangan Rumah Tangga

No	Sumber Listrik	Sangat Miskin	Miskin	Sedang	Kaya	Jumlah KK
1	Tidak ada	134	64	0	0	198
2	Sambung dari tetangga	75	52	0	0	127
3	PLN Pascabayar	0	0	48	89	137
4	PLN Prabayar	0	0	48	18	41
5	Generator	0	0	0	0	0
6	Tenaga Surya	0	0	0	0	0
7	Lain-lain	0	0	0	0	0
JUMLAH		209	116	71	107	503

Sumber : Data Hasil Pendataan Desa Pattiro Tahun 2024

4. Kelembagaan Desa

Keamanan dan ketertiban juga merupakan indikator keberhasilan pembangunan suatu desa. Organisasi atau kelembagaan masyarakat di desa itu sangat menunjang dalam pembangunan desa. Kelembagaan masyarakat yang ada di Desa Pattiro yaitu Remaja Masjid, TKA/TPA, Karang Taruna, LPD, BPD, PKK, Dasawisma, Kelompok Tani, Kelompok Arisan, Kelompok SPP dan sebagainya. Lembaga-lembaga ini belum berfungsi maksimal oleh karena belum ada pembinaan yang maksimal dari pemerintah desa. Selain itu, kualitas Sumber Daya Manusiannya masih perlu ditingkatkan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh warga.

Tabel 4.2 Kondisi Sarana Dan Prasaran

No	Sarana dan Prasarana Umum	Volume	Kondisi 2018	Kondisi 2023
1	Kantor Desa	1 Unit	Baik	Baik
2	TK/PAUD	2 Unit	Rusak/Tidak Dipakai	Baik
3	SD dan Madrasah Ibtidaiyah (MI)	2 Unit	Baik	Baik
4	Pasar Desa		-	-
5	Jalan poros Desa	6 Km	Rusak Berat	Baik
6	Dekker Plat	9 unit	3 Rusak	Baik
7	Jalan Tani	3500 m	Rusak Berat	Baik
8	Drainase	3000 meter	Rusak Ringan	Baik
9	Jalan setapak Paving blok	360 m	Baik	Baik
10	Masjid	5 Unit	2 Unit Rusak Ringan	Baik
11	Posyandu	1 Unit	Baik	Baik
12	Sumur Perpipaan	3 unit	2 Rusak Ringan	Baik
13	Tower/bak penampung	3 unit	Baik	Baik
14	MCK	2 unit	Rusak Parah	Baik

Sumber : Data Hasil Pendataan Desa Pattiro Tahun 2018-2023

e. Demografi

Desa Pattiro merupakan desa yang berjumlah penduduk padat. Hal ini terlihat dari hasil sensus penduduk yang dilakukan pada tahun 2016 lalu yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk Desa Pattiro sekitar 1,741 jiwa dengan jumlah laki-laki: 865 jiwa dan jumlah perempuan: 879 jiwa.

Kepadatan penduduk di Desa Pattiro telah dapat ditekan seiring dengan adanya program Keluarga Berencana yang digalakkan Pemerintah, sehingga dalam satu keluarga di Desa Pattiro pada umumnya hanya terdiri dari lima jiwa.

f. Informan

Tabel. 4.3 Nama-Nama Informan

No.	Nama	Jabatan
1	Jamaluddin Liwang	Kepala Desa
2	Baharuddin, S.IP	Sekretaris Desa
3	Nur Afaisyah	Kaur Keuangan/ Bendahara
4	Dg Ngemba	Tokoh Masyarakat

Sumber: Peneliti, 2024

B. Penyajian Data (Hasil Penelitian)

1. Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur di Desa Pattiro Kecamatan Bangkala Barat

Pembangunan ekonomi adalah proses peningkatan pendapatan per kapita penduduk yang berlangsung dalam jangka waktu lama. Sedangkan infrastruktur adalah aset pemerintah yang dibangun sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat. Untuk mewujudkan perkembangan tersebut, pemerintah telah melaksanakan suatu program dana desa. Dengan dana desa diharapkan mampu meningkatkan pembangunan ekonomi dan infrastruktur di desa. Dalam hal ini peneliti punya melakukan wawancara dengan aparat Desa Pattiro Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto dan beberapa warga Desa Pattiro Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto untuk mengetahui kondisi pembangunan ekonomi dan infrastruktur ada di Desa Pattiro Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto.

Infrastruktur fisik dan sosial dapat digunakan sesuai kebutuhan dasar

masyarakat secara sistematis struktural diperlukan untuk menjamin keuangan sektor publik dan seperti pelayanan dan fasilitas diperlukan di sektor swasta. 100% kebijakan dana desa, 70% untuk pembangunan infrastruktur dan 30% untuk memperkuat masyarakat desa. Infrastruktur saat ini dilaksanakan di Desa Pattiro bermanfaat bagi masyarakat adalah rabat beton, drainase dan pelat duicker di desa Pattiro.

Banyak yang menunjukkan ini didasarkan pada hasil wawancara dengan informan. Mulai dari program pembangunan ekonomi, kebijakan pembiayaan desa dibuktikan dengan pernyataan oleh Ibu Nur Afaisyah selaku Bendahara Desa Pattiro:

“Masyarakat selalu dilibatkan dalam pelaksanaan dan perencanaan pembangunan agar pemerintah desa tidak salah dalam pengambilan keputusan dan keputusannya diakui dengan baik oleh masyarakat.” (Hasil wawancara dengan Ibu Nur Afaisyah selaku bendahara Desa, 2024).

Hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan oleh bapak Baharuddin, S. IP selaku Sekretaris Desa Pattiro, beliau menyatakan bahwa:

“Jadi tidak bisa kita pungkiri bahwa akan ada pihak yang mendukung dan juga pihak yang menghambat program yang akan kami kerjakan, namun kami anggap itu sebagai masukan dalam rencana sehingga ada dipertimbangkan sehingga dapat dievaluasi secara baik. Dan juga sesuai program infrastruktur, dampak bagi warga desa Pattiro sangat bermanfaat dan memudahkan mobilitas masyarakat dalam aktivitas sehari-hari mulai dari infrastruktur jalan rabat beton hingga drainase dan pelat duicker di desa Pattiro” (Hasil wawancara dengan bapak Baharuddin, S. IP selaku Sekretaris Desa Pattiro, 2024).

Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti terhadap kedua informan diatas yaitu Sekertaris Desa dan Bendahara Desa, peneliti menyimpulkan kebijakan itu program perencanaan pembiayaan pembangunan ekonomi telah dilaksanakan dengan baik dan dapat dilakukan dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan

program yang tepat dan pengembangan perekonomian ini dilakukan setiap saat sekali setahun.

Infrastruktur memberikan manfaat yang besar fleksibel dan berguna untuk mendorong mobilitas aktivitas masyarakat dari berbagai aspek kenyamanan. Pemerintahan desa Pattiro harus memperhatikan kebutuhan seluruh masyarakat sehingga infrastruktur yang direncanakan dan diterapkan dapat membantu masyarakat dalam penggunaannya. Bagian terpenting dari pelaksanaan program adalah partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam kerangka kepedulian masyarakat dalam mengawasi program tersebut pembangunan ekonomi, berpartisipasi langsung dalam musyawarah, dan mengemukakan berbagai pendapat untuk keberhasilan implementasi program adalah sebuah bentuk kerjasama unsur-unsur program pembangunan ekonomi, kebijakan dana desa dibuktikan dengan pernyataan bapak Jamaluddin Liwang selaku Kepala Desa, beliau menyatakan bahwa:

“Sangat membantu masyarakat dalam menjalankan usahanya, terutama melalui penggunaan jalan tani dan lorong desa, dan memberikan banyak kemudahan dalam perjalanan, terutama bagi masyarakat petani dan pedagang kaki lima. Dimana seluruh elemen masyarakat berpartisipasi dan mendukung kesuksesan setiap program dan mereka yang terlibat dalam program tersebut pembangunan ekonomi seperti kepala dusu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa dan tokoh masyarakat. Serta pengadaan alat mesin pertanian dan jala desa serta jalan tani” (Hasil Wawancara dengan bapak Jamaluddin Liwang selaku Kepala Desa, 2024).

Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara yang telah dilakukan agar program tersebut terealisasi sangat pembangunan infrastruktur masyarakat merespon dengan baik pembangunan infrastruktur memberikan kemudahan dan kemudahan bagi masyarakat, hal tersebut sejalan dengan pernyataan bapak dg Ngemba selaku tokoh masyarakat Desa Pattiro adalah sebagai berikut:

“Pembangunan infrastruktur dilaksanakan oleh pemerintah desa sangatlah tepat, seperti pembangunan jalan (Rabat Beton), Plat Duekker, Drainase dan lain-lain yang memberikan kemudahan kepada masyarakat terutama pada rakyat petani yang tiap-tiap harinya pergi ke kebun dengan kondisi jalan yang baik” (Hasil Wawancara dengan bapak Dg Ngemba selaku tokoh masyarakat Desa Pattiro, 2024).

Dari hasil wawancara diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa program pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang memadai program pembangunan perekonomian dan infrastruktur sudah berjalan dengan baik. Dari semua program yang direncanakan dan dilaksanakan, semua elemen masyarakat dilibatkan dalam segala hal pertimbangan dan bentuk kekhawatiran yang menentukan masyarakat Desa Pattiro agar mereka bisa menguasainya efektivitas program kebijakan dipegang. Oleh karena itu, hal ini perlu perbaikan berkelanjutan dilakukan sambil tetap beradaptasi situasi dan perkembangan peraturan perundang-undangan saat ini. Keberhasilan dalam program tersebut baik itu pembangunan perekonomian maupun infrastruktur desa Pattiro yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Pattiro tidak dapat dipisahkan dari partisipasi masyarakat.

Program pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang memadai program efisiensi Pembangunan perekonomian dan infrastruktur sudah berjalan dengan baik. Dari semua program yang direncanakan dan dilaksanakan, semua elemen masyarakat dilibatkan dalam segala hal pertimbangan dan bentuk kekhawatiran yang menentukan masyarakat Desa Pattiro agar mereka bisa menguasainya efektivitas program kebijakan dipegang. Oleh karena itu, hal ini perlu perbaikan berkelanjutan dilakukan sambil tetap beradaptasi situasi dan perkembangan peraturan perundang-undangan saat ini.

2. Efektifitas Kebijakan Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur di Desa Pattiro Kecamatan Bangkala Barat

Efektivitas suatu kebijakan dapat dipengaruhi oleh luas wilayah dipengaruhi oleh hal tersebut ketika menyangkut kebijakan apa yang perlu diterapkan dapat bekerja secara efektif dan melayani masyarakat. Dari segala arah kebijakan direncanakan, dilaksanakan dan direalisasikan, seluruh kebijakan dibicarakan dalam bentuk musyawarah. Banyak yang memperhatikan kebijakan itu yang akan diimplementasikan dapat ditegakkan secara efektif berdasarkan analisis konten wawancara dengan informan. Efektivitas implementasi kebijakan dana desa dibuktikan dengan pernyataan Bapak Jamaluddin Liwang selaku Kepala Desa Pattiro, beliau menyatakan bahwa;

“Jadi sebelumnya itu, mengenai efektivitas kebijakan sudah pernah dilaksanakan pembahasan lewat musyawarah Bersama tokoh masyarakat BPD dan juga dari pemerintah kecamatan” (Hasil wawancara dengan bapak Bapak Jamaluddin Liwang selaku Kepala Desa Pattiro, 2024).

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pengawasan seluruh elemen masyarakat mengenai alokasi dana desa dari program pembangunan ekonomi dan infrastruktur untuk efektivitas kebijakan dana desa sesuai dengan harapan masyarakat desa Pattiro. Efektivitas implementasi kebijakan dana desa dibuktikan dengan pernyataan bapak Baharuddin, S. IP selaku sekretaris Desa Pattiro, beliau menyatakan bahwa;

“Untuk setiap pembangunannya dek alhamdulillah sudah sesuai jadwal dan juga telah memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar” (Hasil wawancara dengan bapak Baharuddin, S. IP selaku Sekretaris Desa Pattiro, 2024).

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh peneliti dapat disimpulkan bahwa arah kebijakan dana desa sudah dilaksanakan dan direalisasikan secara tepat waktu menurut harapan masyarakat desa Pattiro. Jadi, bentuk konsultasi dan pengawasan kebijakan masyarakat terhadap program tersebut pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa dapat

berfungsi dengan baik dengan harapan masyarakat kebijakan pendanaan bisa berhasil.

- a. Efektivitas pelaksanaan program pembangunan infrastruktur pedesaan dapat dilihat melalui pencapaian target. Metrik pencapaian tujuan yang diperlukan dianggap memiliki dua sub-metrik: ketepatan waktu dan pencapaian tujuan atau pencapaian tujuan. Berdasarkan pemahaman yang diperoleh melalui wawancara dengan kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa Pattiro, semuanya terlaksana, selesai sesuai jadwal dan program pengembangan untuk pelaksanaan program pembangunan ekonomi Desa Pattiro dan infrastruktur pedesaan. Hal ini tentu saja terjadi di desa implementasi program. Masyarakat desa Sabbang merasa sangat terbantu dengan perkembangan ini dan program ini sangat membantu seluruh masyarakat desa Sabbang. Program-program tersebut antara lain Program Pembangunan Rabat Beton, Pembangunan Saluran Drainase, dan Pelat Ducker.
- b. Efektivitas pelaksanaan program pembangunan ekonomi dan infrastruktur perdesaan dapat dilihat melalui indikator terpadu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum pelaksanaan program pembangunan ekonomi pedesaan dan infrastruktur di desa Sabbang, sosialisasi kepada masyarakat dilakukan terlebih dahulu melalui musyawarah desa/permukiman, pelaksanaan sosialisasi dilakukan dengan tepat dan akurat, dan masyarakat juga sangat terlibat dalam program yang saya minati karena membantu mengembangkan desa Sabbang juga untuk kemajuan desa.
- c. Efektivitas pelaksanaan program pembangunan ekonomi dan infrastruktur pedesaan dapat diukur dengan menggunakan indikator adaptasi.

Pelaksanaan program pembangunan ekonomi dan infrastruktur pedesaan diawali dengan tahap perencanaan program melalui musyawarah desa, dimana usulan masyarakat disusun dan disampaikan kepada musyawarah desa. Anggaran untuk pembangunan ekonomi dan infrastruktur berasal dari Dana Desa. Dana Desa merupakan dana yang disediakan oleh APBN dengan komposisi 30% untuk operasional dan 70% untuk pengembangan. Dana desa dianggap sah apabila digunakan sesuai dengan tujuan dan kebijakan dana desa itu sendiri.

- d. Efektivitas kebijakan pendanaan desa dapat diukur dengan lima hal: kebijakan itu benar, tujuan yang tepat, lingkungan yang tepat, dan proses yang benar. Efektivitas Kebijakan Dana Desa. Efektivitas Kebijakan Dana Desa dilaksanakan sepenuhnya oleh Tim Pengurus Desa. Tim Pelaksana Desa harus terbuka kepada seluruh Masyarakat dalam melaksanakan tugas dan tonggak masa depan yang ingin dicapai. Keterbukaan informasi ini menerapkan prinsip keterbukaan dalam pengelolaan pengalokasian dana desa di Desa Sabbang untuk menciptakan rasa percaya pemerintah desa agar masyarakat memahami program apa saja yang dilaksanakan dipegang. Hal ini merupakan upaya yang dilakukan pemerintah desa untuk mencoba. Pedoman yang dikeluarkan harus didasarkan pada semua aspek Bagian. Bagian ini merupakan salah satu faktor pengalokasian dana desa efektif dan pelaksanaan sesuai rencana, dengan memperhatikan berbagai faktor berdasarkan luas wilayah, tingkat produktivitas masyarakat, dan fasilitas umum yang diperoleh Masyarakat Desa Pattiro Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto.

Efektivitas adalah hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran

yang ingin dicapai. Sebuah proses kegiatan dikatakan efektif apabila mencapai tujuan dan sasaran aktif kebijakan. Efektivitas suatu daerah pengumpulan merupakan perbandingan antara capaian dan tujuan pengumpulan di daerah penerima, dan dengan demikian dapat dianggap sebagai keberhasilan koleksi tersebut (Lestari *et.al*, 2023). Apabila rasio yang dicapai sebesar 100% dapat dikategorikan efektif. Sehingga semakin tinggi rasio yang didapatkan berarti menggambarkan kemampuan desa yang semakin baik (Halim, 2023). Kemampuan pemerintah desa merealisasikan target sangat penting untuk memprediksi aliran kas di masa depan dan membiayai pengeluaran desa.

a. Pendapatan Desa

Tingkat efektivitas dihitung dengan membandingkan antara penerimaan yang sebenarnya alokasi dana desa Pattiro dengan target anggaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pada yakin. Tingkat efektivitas yang dicapai dapat mencapai persentase mendekati 100% atau rasio 1 (satu) maka tingkat efektivitasnya semakin baik. Hal itu berdasarkan Peraturan Menteri Urusan Dalam Negeri nomor 690900-327 tahun 1996, yang mengkategorikan tingkat efektivitas kinerja keuangan dapat diukur dengan penilaian ini. Jika rasio yang dicapai adalah 100% dapat dikategorikan efektif. Jadi semakin tinggi rasionya diperoleh sarana untuk menggambarkan kapasitas lokal yang lebih baik (Natalia dan Khoirunnisa, 2022). Kemampuan pemerintah daerah mewujudkan target sangat penting untuk memprediksi arus kas masa depan mendatang dan membiayai belanja desa. Untuk mengetahui besar efektifitas dan realisasi target pendapatan desa Pattiroa Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto tahun 2018-2023 dengan penghitungan, sebagai berikut:

Untuk mengetahui besar efektifitasnya pendapatan dan realisasi penggunaan dana desa di Desa Pattiro Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten

Jenepono tahun 2018-2023 berikut adalah perhitungannya:

- a. Tahun 2018 = $\frac{\text{Rp } 906.898.000,00}{\text{Rp } 906.898.000,00} \times 100\% = 100\%$
- b. Tahun 2019 = $\frac{\text{Rp } 1.889.587.061,00}{\text{Rp } 1.885.028.165,00} \times 100\% = 100,02\%$
- c. Tahun 2020 = $\frac{\text{Rp } 1.643.721.582,00}{\text{Rp } 1.682.437.525,00} \times 100\% = 97,69\%$
- d. Tahun 2021 = $\frac{\text{Rp } 1.818.756.250,00}{\text{Rp } 1.874.924.349,00} \times 100\% = 97,00\%$
- e. Tahun 2022 = $\frac{\text{Rp } 1.885.028.165,00}{\text{Rp } 1.889.587.061,00} \times 100\% = 99,75\%$
- f. Tahun 2023 = $\frac{\text{Rp } 1.943.672.115,00}{\text{Rp } 1.921.735.428,00} \times 100\% = 101,14\%$

Pengelolaan alokasi dana desa di desa Pattiro naik tahun 2023 yaitu total sasaran alokasi dana desa Rp.1.942.658.370,00 dan yang terealisasi sebesar Rp.1.991.467.291,00 jadi kalau targetnya dibagi dana yang direalisasikan dan dikalikan 100% hasilnya 96,06%.

Untuk mengetahui realisasi target pendapatan Desa Pattiro, Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel 4.3 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Realisasi pendapatan Desa Pattiro Tahun 2018-2023

Tahun	Target Pendapatan Desa (Rp)	Realisasi Belanja Desa (Rp)	Efektifitas (%)
2018	906.898.000,00	906.898.000,00	100%
2019	1.099.601.000,00	1.098.601.000,00	100,02%
2020	1.682.437.525,00	1.643.721.582,00	97,69%
2021	1.874.924.349,00	1.818.756.250,00	97,00%
2022	1.889.587.061,00	1.885.028.165,00	99,75%
2023	1.943.672.115,00	1.921.735.428,00	101,14%

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun 2018-2023, *Data Diolah (2024)*

Realisasi pendapatan Nampak bahwa sejak tahun 2018-2023 terus mengalami peningkatan. Dari pendapatan ini selayaknya digunakan untuk membiayai pembangunan ekonomi dan infrastruktur.

Untuk mengetahui efektivitas alokasi penggunaan atas belanja desa perkembangan dari tahun 2018 hingga 2023 dapat dilihat pada hasil penghitungan sebagai berikut:

- a. Tahun 2018 = $\frac{\text{Rp } 876.896.000,00}{\text{Rp } 876.896.000,00} \times 100\% = 100\%$
- b. Tahun 2019 = $\frac{\text{Rp } 1.078.486.500,00}{\text{Rp } 1.078.486.600,00} \times 100\% = 100\%$
- c. Tahun 2020 = $\frac{\text{Rp } 1.785.492.362,00}{\text{Rp } 1.792.610.734,00} \times 100\% = 99,60\%$
- d. Tahun 2021 = $\frac{\text{Rp } 1.795.016.623,00}{\text{Rp } 1.875.175.719,00} \times 100\% = 95,72\%$

$$e. \text{ Tahun 2022} = \frac{\text{Rp } 1.940.600.365,00}{\text{Rp } 1.945.159.261,00} \times 100\% = 99,76\%$$

$$f. \text{ Tahun 2023} = \frac{\text{Rp } 1.961.467.291,00}{\text{Rp } 1.942.658.370,00} \times 100\% = 100,96\%$$

Tabel 4.4 Target Belanja dan Realisasi Desa Pattiro Tahun 2018-2023

Tahun	Target Belanja Desa (Rp)	Realisasi Belanja Desa (Rp)	Efektifitas (%)
2018	876.896.000,00	876.896.000,00	100%
2019	1.078.486.600,00	1.078.486.500,00	100%
2020	1.792.610.734,00	1.785.492.362,00	99,60%
2021	1.875.175.719,00	1.795.016.623,00	95,72%
2022	1.945.159.261,00	1.940.600.365,00	99,76%
2023	1.961.467.291,00	1.942.658.370,00	99,04%

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun 2018-2023, *Data Diolah* (2024)

Pengelolaan Dana Desa di Pattiro tahun anggaran 2019 – 2021 berhasil dinilai memiliki kategori efisien. Efisiensi dalam hal ini berdasarkan pernyataan Mahmudi (2019:85) yang dinilai sebagai pembandingan dilakukan atas penggunaan keluaran dengan perolehan hasil masukan. Dalam hal ini, maka organisasi dalam menjalankan program atau melaksanakan kegiatan akan dapat dinilai telah dilaksanakan secara efisien dalam kondisi mampu menggunakan outputnya tertentu dengan memperoleh hasil masukan yang dalam hal ini menggunakan nilai serendah mungkin atau dengan masukan-masukan tertentu yang akan mampu memberikan penggunaan keluaran yang bernilai sebesar mungkin. Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dana desa, perolehannya adalah: hasil

keluaran dinilai sebagai keluaran pengeluaran dan masukan dalam hal ini dinilai sebagai penghasilan. Pada tahun 2019, jumlah output yang dihasilkan pada kondisi tersebut adalah lebih besar dari jumlah input, kondisi yang sama muncul pada tahun 2020 menuju hingga tahun 2021. Rasio efisiensi Pemerintahan Desa Pattiro pada tahun 2019 sebesar 100,18% dan pada tahun 2020 sebesar 100,47%, hal ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 sehingga refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19. Pada tahun 2021 rasionya menurun menjadi 98,38% sehingga dikategorikan kurang efisien.

Pengelolaan dana Desa Pattiro tahun anggaran 2018 – 2019 dikategorikan sangat efektif namun pada tahun anggaran 2021-2023 dikategorikan efektif. Menurut Masuri (2014:11), efektivitas dalam hal ini dinilai seberapa baik jalannya pekerjaan yang dilaksanakan atau dilaksanakan, dinilai dari seberapa jauh kemampuan orang tersebut dalam hal ini untuk memberikan hasil keluaran yang selaras dengan apa yang merupakan rencana atau harapan pada awalnya. Artinya dalam hal ini bahwa pada suatu saat pekerjaan dapat diselesaikan dan kemudian diselesaikan apa adanya perencanaan yang baik yang mencakup aspek waktu, aspek biaya, serta dari aspek kualitas dapat dinilai telah terselesaikan dengan efektif. Salah satu program di Desa Pattiro adalah pembangunan jalan lingkungan desa. Program ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memudahkan akses bagi masyarakat desa Pattiro.

Mengukur efektivitas pengelolaan dana desa merupakan aspek yang penting penelitian ini, karena membantu menilai sejauh mana keberhasilan pengelolaan dana desa dilaksanakan di suatu desa. Penilaian efektivitas ini merupakan ukuran penting dalam mengevaluasi kualitas kerja yang telah dilakukan, khususnya dalam konteks pengelolaan dana desa yang dampaknya harus dirasakan oleh masyarakat setempat.

C. PEMBAHASAN

Analisis efektivitas pengelolaan keuangan pemerintahan desa dapat dikemukakan sebagai berikut. Untuk menghitung efektivitas kebijakan pengelolaan dana desa dalam penelitian ini digunakan metode kuantitatif adalah mengenai besarnya alokasi dana desa yang diterima desa dan telah direalisasikan kebutuhan desa Pattiro.

1. Efektivitas Kebijakan Dana Desa

Efektivitas suatu kebijakan bisa saja dipengaruhi oleh luas wilayah terpengaruh ketika sampai pada hal itu kebijakan apa yang perlu diterapkan agar dapat bekerja secara efektif dan melayani masyarakat. Dari semua arah kebijakan yang direncanakan, diimplementasikan dan direalisasikan, semua kebijakan dibahas dalam bentuk musyawarah. Banyak yang mencatat bahwa kebijakan tersebut akan dilaksanakan dan dapat dilaksanakan efektif berdasarkan analisis konten wawancara dengan informan. Efektivitas implementasi kebijakan dana desa dibuktikan dengan pernyataan bapak. Jadi, bentuk konsultasi dan pengawasan kebijakan masyarakat terhadap program tersebut pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa dapat berfungsi dengan baik dengan harapan masyarakat kebijakan pendanaan bisa berhasil.

2. Pembangunan Ekonomi

Menurut Easton (2016) pembangunan ekonomi adalah upaya untuk meningkatkan taraf hidup dan memanfaatkannya secara sistematis potensi yang ada. Banyak yang menunjukkan ini didasarkan pada program pembangunan ekonomi, kebijakan pembiayaan desa. Kebijakan program perencanaan pembiayaan pembangunan ekonomi telah dilaksanakan dengan baik dan dapat dilakukan dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan program yang tepat dan pengembangan perekonomian ini

dilakukan setiap saat sekali setahun sebab harus menyesuaikan dengan kondisi cuaca serta kebutuhan dari masyarakat. Bagian terpenting dari pelaksanaan program adalah partisipasi seluruh tokoh masyarakat dalam kerangka kepedulian masyarakat dalam mengawasi program tersebut pembangunan ekonomi, berpartisipasi langsung dalam musyawarah, dan mengemukakan berbagai pendapat untuk keberhasilan implementasi program. adalah sebuah bentuk kerjasama unsur-unsur program pertumbuhan ekonomi. keberhasilan dalam program tersebut pengembangan perekonomian desa dilaksanakan oleh pemerintah desa tidak dapat dipisahkan dari partisipasi public.

3. Infrastruktur

Infrastruktur fisik dan sosial dapat digunakan sesuai kebutuhan dasar masyarakat secara sistematis struktural diperlukan untuk menjamin keuangan sektor publik dan seperti pelayanan dan fasilitas diperlukan di sektor swasta. 100% kebijakan dana desa, 70% untuk pembangunan infrastruktur dan 30% untuk memperkuat masyarakat desa. Infrastruktur saat ini dilaksanakan di Desa Pattiro bermanfaat bagi masyarakat adalah rabat beton, drainase dan pelat duicker di Desa Pattiro. Dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat adalah keluarnya lebih banyak kebijakan desa fokus pada pembangunan infrastruktur untuk memberikan lebih banyak dukungan kepada masyarakat, seperti: Drainase dan rabat konkrit, dimana komunitas pernah mengalami banjir sebelumnya parit dibangun, di mana jalan dulunya berada pelayanan sering terhambat, jadi rabat konkrit ini dapat dilakukan memudahkan perjalanan masyarakat. Kebijakan ini sejalan dengan keinginan masyarakat untuk mendapatkan lebih banyak berfokus pada pembangunan berguna dan sangat fisik membantu masyarakat

Sesuai pada hasil penelitian tentang pengelolaan dana desa adalah

berdasarkan pada penilaian:

1. Ketetapan sasaran yaitu sebagaimana ketepatannya dilaksanakan sesuai dengan yang ditentukan sebelumnya.
2. Adanya sosialisasi program sehingga informasi dapat tersampaikan kepada masyarakat desa.
3. Tujuan program Pembangunan ekonomi dan infrastruktur desa adalah sesuai dengan yang telah ditetapkan.
4. Adanya pemantauan terhadap pelaksana kegiatan setelah kebijakan dana desa direalisasikan.

Semua penjelasan tersebut didasarkan pada prinsip partisipasi, kemandirian dan keberlanjutan untuk kemajuan desa dan masyarakatnya. Jika berdasarkan pada prinsip tersebut, maka dapat dikatakan adanya efektivitas dari kebijakan dana desa dalam rangka pembiayaan Pembangunan ekonomi dan infrastruktur desa. Hal tersebut bisa ditunjukkan beberapa kebijakan:

1. Penjelasan dana belanja desa pada tahun 2018 dikatakan sangat efektif
2. Pengelolaan dana desa / belanja desa pada tahun 2019 juga sangat efektif
3. Pengelolaan dana desa / belanja desa pada tahun 2020 alokasi cukup efektif
4. Pengelolaan dana desa / belanja desa pada tahun 2021 alokasinya juga sangat efektif
5. Pengelolaan dana desa / belanja desa pada tahun 2022 alokasi sangat efektif
6. Pengelolaan dana desa / belanja desa pada tahun 2023 alokasi sangat efektif

Terjadinya perbedaan efektivitas pada tahun anggaran tahun 2018 hingga tahun 2019 yang berkontribusi sangat efektif dibandingkan tahun 2020 hingga

tahun 2023 yang efektivitasnya menurun disebabkan karena terjadinya gejala ekonomi karena wabah covid-19, yaitu adanya pelemahan ekonomi, misalnya melemahnya konsumsi masyarakat / rumah tangga dan melemahnya daya beli masyarakat. Juga adanya keraguan investasi. Semua juga dikarenakan adanya pelamahan ekonomi daerah dan nasional yang berakibat perlambatan peetumbuhan ekonomu termasuk Pembangunan infrastruktur.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur di Desa Pattiro Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan anggaran dana desa belum berjalan efektif. Efektivitas kebijakan pengelolaan alokasi dana Desa Pattiro tahun anggaran 2018 dilihat oleh Pemerintah Desa Pattiro mampu merealisasikan sebesar 100% atau kategori efektif. Pada tahun 2019 naik menjadi 100,02% atau kategori sangat efektif. Namun pada tahun 2020 turun menjadi 97,69% diikuti pada tahun 2021 sebesar 97,00% disebabkan adanya wabah covid-19. Akan tetapi pada tahun 2022 meningkat menjadi 99,75% dan juga pada tahun 2023 sebesar 101,14% sangat efektif.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Desa

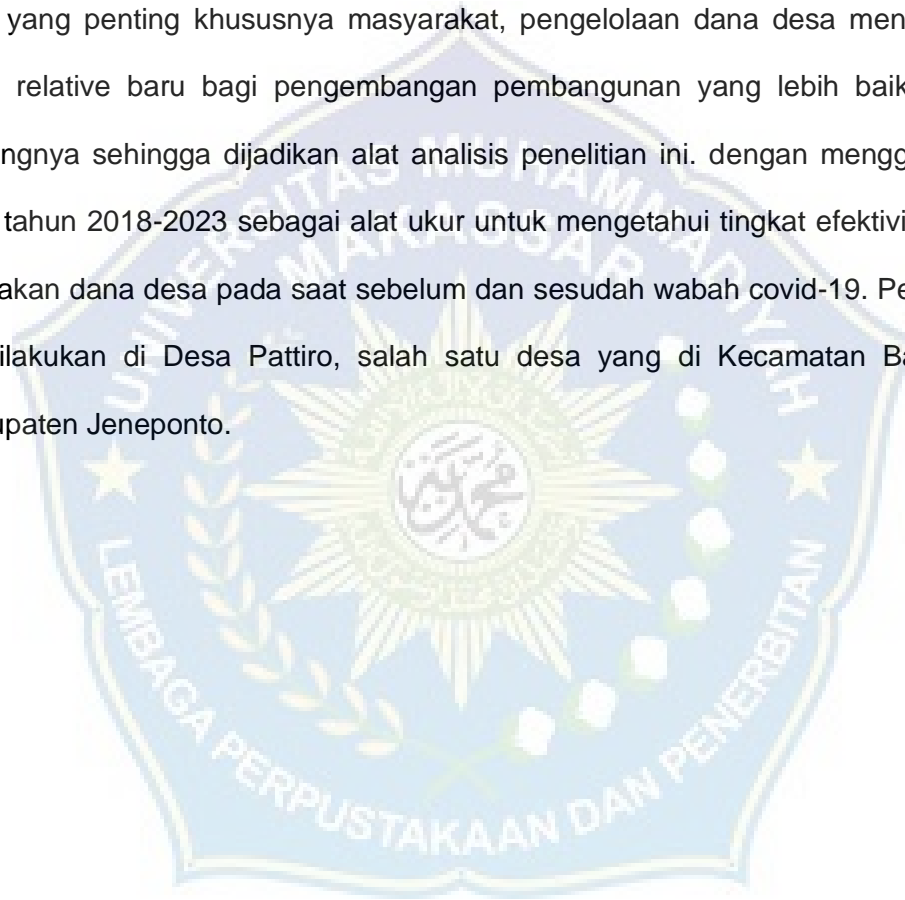
Pemerintah Desa diharapkan agar lebih memaksimalkan pengelolaan alokasi dana desa sehingga masyarakat dapat merasakan dampak dari pembangunan baik itu secara fisik maupun fisik. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengatasi kendala tersebut yang muncul seperti pengawasan yang lebih optimal, sosialisasi yang lebih efektif, dan perbaikan motivasi dan pengetahuan perangkat desa. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan adanya pengelolaan anggaran dana desa dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar penduduk desa Pattiro.

2. Bagi Masyarakat

Diharapkan masyarakat turut serta dalam setiap pembangunan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan bahkan ikut terlibat dalam mengawasi sehingga pengelolaan alokasi dana desa tepat sasaran serta pembangunan dapat berjalan optimal.

C. Novelty (Kebaharuan)

Penelitian menggunakan dilakukan pada tahun 2024 efektivitas menjadi alat ukur yang penting khususnya masyarakat, pengelolaan dana desa menjadi hal yang relative baru bagi pengembangan pembangunan yang lebih baik. Itulah pentingnya sehingga dijadikan alat analisis penelitian ini. dengan menggunakan data tahun 2018-2023 sebagai alat ukur untuk mengetahui tingkat efektivitas dari kebijakan dana desa pada saat sebelum dan sesudah wabah covid-19. Penelitian ini dilakukan di Desa Pattiro, salah satu desa yang di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto.



DAFTAR PUSTAKA

- Agus Ashari, Jumardi, Salam, Wahidayanti, & Srianti Permata. (2021). Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Yang Islami Di Desa Patilereng. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(1), 52–66. <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v6i1.584>
- Amelia, I. (2018). Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Sijung Kang Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan. *Jurnal At-Taghyir: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Desa*, 1(1), 42–53. <https://doi.org/10.24952/taghyir.v1i1.960>
- Archan Yudistira¹, Endang Indartuti², B. S. (2018). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2018 Bagi Pembangunan Infrastruktur Di Desa Ngimbangan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(2), 1193–1200.
- Citra Permatasari, N. H. (2022). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Margamukti Pengalengan Menurut Persepektif Islam. *As-Syirkah: Islamic Economics & Finacial Journal*, 1(1), 39–56. <https://doi.org/10.56672/assyirkah.v3i2.210>
- Dewi, Sinta Kusuma. 2019. Pengaruh Implementasi Buku Ajar Strategi Metakognitif Terintegrasi Mind Map Terhadap Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Materi Mutasi. *Berkala Ilmiah Pendidikan Biologi*. No 2, Volume 8, Halaman 327-333.
- Efisiensi, A., Dana, P., Studi, D., Efisiensi, A., Efektivitas, D. A. N., Dana, P., Purnamasari, I., Fakultas, A., Universitas, B., Martiningsih, R. S. P., Fakultas, A., Universitas, B., Rakhmawati, I., Lombok, K., & Tahun, B. (2022). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Mandiri di Kabupaten Lombok Barat). 72–79.
- Jovanca Mamuja, F. K., & Kambey, A. (2021). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sea Satu Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. 2(2), 249–258.
- Khadlirin, A., Mulyantomo, E., & Widowati, S. Y. (2021). Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pengelolaan Dana Desa (Study Empiris Dana Desa di Desa Tegalarum Kabupaten Demak Tahun 2016-2020). *Solusi*, 19(2), 50–65. <https://doi.org/10.26623/slsi.v19i2.3162>
- Lestari, K. A. D., Trisnadewi, A. A. A. E., & Jayanti, L. G. P. S. E. (2020). Analisis Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2018 Di Desa Dawan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 1(1), 15–20. <https://doi.org/10.22225/jraw.1.1.1522.15-20>

- Mamuaja, J., Kawatu, F. S., & Kambey, A. (2021). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 7(1), 249–258. <https://doi.org/10.53682/jaim.v2i2.1221>
- Pembangunan, J. E., Ekonomi, F., & Sam, U. (2024). Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Siau Barat. 24(1), 157–168.
- Pengelolaan, E., Desa, D., Desa, D. I., Sumenep, K. K., Sumenep, K., Gafur, A., & Zulfikar, A. I. (2024). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep. 1(1), 1–9.
- Prasetyani, M., & Kusumawati, E. (2024). Determinasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo). 08(01), 1–15.
- Sihite, R. R., Adam, A., & Musthafa, W. (2023). Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Sileang Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pemerintahan (JIAPP)*, 2(2), 92–98. <https://doi.org/10.31289/jiaap.v2i2.2146>
- Yusri, A. Z. dan D. (2020). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Gerdema dan RT Bersih di Desa Taras, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 7(2), 809–820. <https://doi.org/10.32884/ideas.v10i1.1680>
- Desa. Jakarta. Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tentang Pengelolaan
- Keuangan Desa. Jakarta. Wayan Rusastra. (2015). *Keberlanjutan Pengembangan Infrastruktur Dalam Mendukung Percepatan: P3DI*.
- Mahsun, Muhammad. 2018. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik Efektivitas dan Efisiensi*. Yogyakarta: BPF.
- Manajemen Edisi 2. Yogyakarta: BPF Hanif Nurcholis, (2016). *Teori*
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi.
- Moleong, Lexy J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Iwan dan Rokhmin Dahuri. 2004. *Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES.
- Nurhayati, (2017). *Membangun Kepemimpinan Yang Efektif Untuk Meraih Keunggulan Kompetitif*

Oktaresa. (2015). *Alokasi Dana Desa*. Yogyakarta: BPFE Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang kode dan data wilayah administrasi

Organisasi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol.15. No. 2: 21-27. *Pembangunan Ekonomi Indonesia*. Jakarta Handoko, T.(2015).

Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 tentang *penetapan prioritas penggunaan dana desa*. *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Teransmigrasi No. 21 Tahun 2015*

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang *Dana Desa yang bersumber dari Anggaran*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang

Rahajeng, Anggi. (2016). *Perencanaan Penganggaran Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UGM Press.

Ravianto J. 2014. *Produktivitas dan Pengukuran*, Jakarta. Binaman Aksara

Sukirno, Sadono. (2004). *Makro Ekonomi*. Edisi Ketiga. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.tentang prioritas penggunaan dana desa.



L

A

M

P

I

R

A

N



PERTANYAAN WAWANCARA

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN DANA DESA DALAM PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAN INFRASTRUKTUR DI DESA PATTIRO KECAMATAN BANGKALA BARAT KABUPATEN JENEPONTO

A. Instrumen Penelitian

Adapun daftar pertanyaan yang akan diajukan pada proses wawancara adalah sebagai berikut:

1. Berapa besar anggaran dana desa yang diterima oleh desa Pattiro setiap tahunnya?

Jawab:

Kepala desa : Untuk anggaran yang diterima itu beda setiap tahunnya.

Bendahara : Kalau untuk anggarannya itu setiap tahunnya beda-bedaki yang diterima.

2. Siapa saja yang terlibat dalam perencanaan program pembangunan ekonomi dan infrastruktur di desa Pattiro?

Jawab:

Kepala desa : Jadi yang terlibat itu pastinya tokoh masyarakat, pengurus BPD dan juga pemerintah kecamatan serta jajaran pemerintah desa

Tokoh Masyarakat : Untuk rapat di kantor desa atau pada saat musrembang itu ada beberapa tokoh masyarakat dan pihak-pihak yang diundang.

3. Dalam bentuk apa saja pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang sudah dijalankan?

Jawab:

Kepala desa : Jadi untuk pembangunannya itu bertahap, jadi ada pembangunan fisik dan juga fisik. Sangat membantu masyarakat dalam menjalankan usahanya, terutama melalui penggunaan jalan tani dan lorong desa, dan memberikan banyak kemudahan dalam perjalanan, terutama bagi masyarakat petani dan pedagang kaki lima. Dimana seluruh elemen

masyarakat berpartisipasi dan mendukung kesuksesan setiap program dan mereka yang terlibat dalam program tersebut pembangunan ekonomi seperti kepala dusu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa dan tokoh masyarakat. Serta pengadaan alat mesin pertanian dan jala desa serta jalan tani.

Tokoh Masyarakat: Pembangunan infrastruktur dilaksanakan oleh pemerintah desa sangatlah tepat, seperti pembangunan jalan (Rabat Beton), Plat Duekker, Drainase dan lain-lain yang memberikan kemudahan kepada masyarakat terutama pada rakyat petani yang tiap-tiap harinya pergi ke kebun dengan kondisi jalan yang baik.

4. Apakah dana desa dapat membantu dalam peningkatan pembangunan ekonomi dan infrastruktur di desa Pattiro?

Jawab:

Kepala desa : Alhamdulillah sangat membantu kami dalam membangun desa

Sekretaris desa : Iya, kalau dibilang sangat membantu alhamdulillah, meskipun pencairannya itu bertahapki 3 kali dalam setahun.

5. Program apa saja yang sudah dijalankan oleh pemerintah desa Pattiro dalam meningkatkan pembangunan ekonomi dalam bidang (Kesehatan, Pendidikan, dan peningkatan pendapatan masyarakat) di desa Pattiro?

Jawab:

Kepala desa : Tentunya pembangunan fisik dan juga non fisik yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Seperti gaji guru paud, penyuluhan posyandu, pendataan SDMD dan juga KPM.

Tokoh Masyarakat : Iyaa, sudah beberapa pengerjaan yang dilaksanakan baik itu jalaan, irigasi sama pembinaan sama penyuluhan.

6. Apakah program-program yang sudah dijalankan sudah tepat sasaran?

Jawab:

Kepala desa : Kalau dibilang tepat sasaran, alhamdulillah karena seperti yang kita

lihat kemajuan des aini akan tetapi tentunya ada yang belum sempurna dan juga pembangunannya bertahap.

Tokoh Masyarakat : Untuk itu mungkin pemerintah desa yang tahu namun untuk pembangunan sudah terlihat oleh masyarakat.

7. Apakah bapak/ibu terlibat langsung dalam pengawasan pembangunan ekonomi dan infrastruktur di desa Pattiro?

Jawab:

Kepala desa : Masyarakat selalu dilibatkan dalam pelaksanaan dan perencanaan pembangunan agar pemerintah desa tidak salah dalam pengambilan keputusan dan keputusannya diakui dengan baik oleh masyarakat
Tentunya kami bersama masyarakat sama-sama ikut mengawasi

Tokoh Masyarakat : Iyaa, tentunya masyarakat punya peran untuk mengawasi

8. Apa saja kendala dalam proses pelaksanaan program pembangunan tersebut?

Jawab:

Kepala desa : Adanya usulan masyarakat untuk pembangunan jalan namun tidak ada surat keterangan hibahnya. Jadi tidak bisa kita pungkiri bahwa akan ada pihak yang mendukung dan juga pihak yang menghambat program yang akan kami kerjakan, namun kami anggap itu sebagai masukan dalam rencana sehingga ada dipertimbangkan sehingga dapat dievaluasi secara baik. Dan juga sesuai program infrastruktur, dampak bagi warga desa Pattiro sangat bermanfaat dan memudahkan mobilitas masyarakat dalam aktivitas sehari-hari mulai dari infrastruktur jalan rabat beton hingga drainase dan pelat duicker di desa Pattiro.

Tokoh Masyarakat : Mungkin pada proses pencairannya dan juga hibah dari masyarakat

9. Kapan pelaksanaan program pembangunan ekonomi dan infrastruktur tersebut?

Jawab:

Kepala desa : Jadi untuk pembangunannya itu trisemesterki

Bendahara desa: Tahun berjalan atau pencairan dana desa

10. Apakah masyarakat dilibatkan dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan juga pengawasan?

Jawab:

Kepala desa : Iyaa, padat karya tunai

Sekretaris Desa : Tentunya masyarakat punya peran dalam pembangunan desa ini

11. Apakah penggunaan anggaran dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur sudah efektif?

Jawab:

Kepala desa : Jadi sebelumnya itu, mengenai tingkat efektifitas kebijakan alokasi dana desa tentunya melewati pembahasan dan juga evaluasi yang dilakukan lewat musyawarah bersama tokoh masyarakat BPD dan juga dari pemerintah kecamatan serta ada masukan dari pihak pemeriksa mengenai program pembangunan desa.

Sekretaris desa : Untuk setiap pembangunannya dek alhamdulillah sudah sesuai jadwal dan juga telah memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar.

B. Hasil Transkrip Wawancara

No.	Coding	Transkrip
	Kepala Desa	Untuk anggaran yang diterima itu beda setiap tahunnya.
	Bendahara Desa	Kalau untuk anggaranya itu setiap tahunnya beda bedaki yang diterima.
	Kepala Desa	Jadi yang terlibat itu pastinya tokoh masyarakat, pengurus BPD dan juga pemerintah kecamatan serta jajaran pemerintah desa.
	Tokoh Masyarakat	Untuk rapat di kantor desa atau pada saat musrembang itu ada beberapa tokoh masyarakat dan pihak-pihak yang diundang.

	Kepala desa	Jadi untuk pembangunannya itu bertahap, jadi ada pembangunan fisik dan juga fisik. Sangat membantu masyarakat dalam menjalankan usahanya, terutama melalui penggunaan jalan tani dan lorong desa, dan memberikan banyak kemudahan dalam perjalanan, terutama bagi masyarakat petani dan pedagang kaki lima. Dimana seluruh elemen masyarakat berpartisipasi dan mendukung kesuksesan setiap program dan mereka yang terlibat dalam program tersebut pembangunan ekonomi seperti kepala dusu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa dan tokoh masyarakat. Serta pengadaan alat mesin pertanian dan jala desa serta jalan tani
	Tokoh Masyarakat	Pembangunan infrastruktur dilaksanakan oleh pemerintah desa sangatlah tepat, seperti pembangunan jalan (Rabat Beton), Plat Duekker, Drainase dan lain-lain yang memberikan kemudahan kepada masyarakat terutama pada rakyat petani yang tiap-tiap harinya pergi ke kebun dengan kondisi jalan yang baik.
	Kepala Desa	Alhamdulillah sangat membantu kami dalam membangun desa.
	Sekretaris Desa	Iya, kalau dibilang sangat membantu alhamdulillah, meskipun pencairannya itu bertahapki 3 kali dalam setahun.
	Kepala Desa	Tentunya pembangunan fisik dan juga non fisik yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Seperti gaji guru paud, penyuluhan posyandu, pendataan SDMD dan juga KPM.
	Tokoh Masyarakat	Untuk itu mungkin pemerintah desa yang tahu namun untuk pembangunan sudah terlihat oleh masyarakat.

	Kepala Desa	Masyarakat selalu dilibatkan dalam pelaksanaan dan perencanaan pembangunan agar pemerintah desa tidak salah dalam pengambilan keputusan dan keputusannya diakui dengan baik oleh masyarakat. Tentunya kami bersama masyarakat sama-sama ikut mengawasi.
	Tokoh Masyarakat	Iyaa, tentunya masyarakat punya peran untuk mengawasi.
	Kepala Desa	Adanya usulan masyarakat untuk pembangunan jalan namun tidak ada surat keterangan hibahnya. Jadi tidak bisa kita pungkiri bahwa akan ada pihak yang mendukung dan juga pihak yang menghambat program yang akan kami kerjakan, namun kami anggap itu sebagai masukan dalam rencana sehingga ada dipertimbangkan sehingga dapat dievaluasi secara baik. Dan juga sesuai program infrastruktur, dampak bagi warga desa Pattiro sangat bermanfaat dan memudahkan mobilitas masyarakat dalam aktivitas sehari-hari mulai dari infrastruktur jalan rabat beton hingga drainase dan pelat duicker di desa Pattiro.
	Tokoh Masyarakat	Mungkin pada proses pencairannya dan juga hibah dari masyarakat.
	Kepala Desa	Jadi untuk pembangunannya itu trisemesterki
	Bendahara Desa	Tahun berjalan atau pencairan dana desa
	Kepada Desa	Iyaa, padat karya tunai
	Sekretris Desa	Tentunya masyarakat punya peran dalam pembangunan desa ini
	Kepala Desa	Jadi sebelumnya itu, mengenai tingkat efektifitas kebijakan alokasi dana desa tentunya melewati pembahasan dan juga evaluasi yang dilakukan lewat musyawarah bersama tokoh masyarakat BPD dan juga dari pemerintah kecamatan serta

		ada masukan dari pihak pemeriksa mengenai program pembangunan desa.
	Sekretaris desa	Untuk setiap pembangunannya dek alhamdulillah sudah sesuai jadwal dan juga telah memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar.



Dokumentasi Wawancara



Bersama Kepala Desa Pattiro, Kecamatan Bangkala Barat, Kab. Jeneponto



Bersama Bendahara Desa Pattiro, Kecamatan Bangkala Barat, Kab. Jeneponto



Bersama Sekretaris Desa Pattiro, Kecamatan Bangkala Barat, Kab. Jeneponto



Bersama Tokoh Masyarakat Desa Pattiro, Kecamatan Bangkala Barat

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA PEMERINTAH DESA PATTIRO TAHUN ANGGARAN 2018				
Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APBN)			Realisasi s.d 31-12-2018	
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
1.	PENDAPATAN			
1.2.	Pendapatan Transfer	906.898.000,00	906.898.000,00	0,00
1.2.1.	Dana Desa	906.898.000,00	906.898.000,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	906.898.000,00	906.898.000,00	0,00
2.	BELANJA			
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	876.896.000,00	876.896.000,00	0,00
2.2.2	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa	440.285.500,00	440.285.500,00	0,00
2.2.2.3.	Belanja Modal	440.285.500,00	440.285.500,00	0,00
2.2.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa	440.285.500,00	440.285.500,00	0,00
2.2.5	Pembangunan dan Pemeliharaan Talud Desa	45.197.000,00	45.197.000,00	0,00
2.2.5.3.	Belanja Modal	45.197.000,00	45.197.000,00	0,00
2.2.5.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa	45.197.000,00	45.197.000,00	0,00
2.2.7	Pembangunan dan Pemeliharaan Embung / Sistem Pengi	190.340.000,00	190.340.000,00	0,00
2.2.7.3.	Belanja Modal	190.340.000,00	190.340.000,00	0,00
2.2.7.3.29.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air	190.340.000,00	190.340.000,00	0,00
2.2.10	Pembangunan dan Pemeliharaan Pembangkit Listrik Miku	13.173.500,00	13.173.500,00	0,00
2.2.10.3.	Belanja Modal	13.173.500,00	13.173.500,00	0,00
2.2.10.3.31	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	13.173.500,00	13.173.500,00	0,00
2.2.13	Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Irigasi Desa	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
2.2.13.3.	Belanja Modal	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
2.2.13.3.29	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
2.2.21	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perta	127.900.000,00	127.900.000,00	0,00
2.2.21.3.	Belanja Modal	127.900.000,00	127.900.000,00	0,00
2.2.21.3.13	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolah Pertanian	127.900.000,00	127.900.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	876.896.000,00	876.896.000,00	0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	30.002.000,00	30.002.000,00	0,00
3.	PEMBIAYAAN			
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	30.002.795,00	30.000.000,00	2.795,00
3.2.2.	Penyertaan Modal Desa	30.002.795,00	30.000.000,00	2.795,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN	(30.002.795,00)	(30.000.000,00)	(2.795,00)

Dokumentasi LPJ Pemerintah Desa Pattiro, Kecamatan Bangkala Barat, Kab.
Jeneponto

Catatan: Data yang disajikan hanya untuk sampel (file)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 145 / 05 / A.2-II / XII / 45 / 2023
 Desember 2023

Makassar, 20

Lamp : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar

Di-

Tempat

Dengan Hormat

Dalam rangka proses penelitian dan penulisan skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : RAHMIATI

Stambuk : 105711104320

Jurusan : Ekonomi Pembangunan

Judul Penelitian : **EVEKTIVITAS KEBIJAKAN DANA DESA DALAM
 PEMBANGUNAN EKONOMI DAN INFRASTRUKTUR
 DESA PATTIRO KECAMATAN BANGKALA BARAT
 KABUPATEN JENEPONTO**

Dimohon kiranya mahasiswa tersebut dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian
 sesuai tempat mahasiswa tersebut malakukan penelitian

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuanya diucapkan terimakasih.



Tembusan:



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor : **32197/S.01/PTSP/2023** Kepada Yth.
 Lampiran : - Bupati Jeneponto
 Perihal : **Izin penelitian**

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 3112/05/C.4-VIII/XII/1445/2023 tanggal 21 Desember 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **RAHMIATI**
 Nomor Pokok : 105711104320
 Program Studi : Ekonomi pembangunan
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
 Alamat : Jl. Sif Alauddin No. 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" EFEKTIVITAS KEBIJAKAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DAN INFRASTRUKUR DESA PATTIRO KECAMATAN BANGKALA BARAT KABUPATEN JENEPONTO "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **04 Januari s/d 04 Maret 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada Tanggal 23 Desember 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
 Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
 Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth
 1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
 2. Peringgal.



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Ishak Iskandar, Kel. Empoang Kec. Binamu Kab. Jeneponto, 92311, dpmpmsp.jeneponto@gmail.com

Dpmpmsp.jenepontokab.go.id

IZIN PENELITIAN

Nomor: 73.4/002/IP/DPMPPTSP-JNP/1/2024

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Rekomendasi Tim Teknis Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jeneponto Nomor : 03/1/REK-IP/DPMPPTSP/2024.

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

Nama : RAHMIATI
 Nomor Pokok : 105711104320
 Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
 Lembaga : DESA PATTIRO
 Pekerjaan Peneliti : MAHASISWA
 Alamat Peneliti : DESA PATTIRO
 Lokasi Penelitian : DESA PATTIRO KECAMATAN BANGKALA BARAT

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka MENELITI dengan Judul :

**EFEKTIVITAS KEBIJAKAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DAN INFRASTRUKTUR
 DESA PATTIRO KECAMATAN BANGKALA BARAT KABUPATEN JENEPONTO**

Lamanya Penelitian : 2024-01-04 s/d 2024-03-04

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
 2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
 3. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Jeneponto Cq. Bidang Penelitian & Pengembangan.
 4. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.
- Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jeneponto

\$(result_tgl_sgn)

KEPALA DINAS,

\$(result_surl_qrcode)



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dr. HJ. MERIYANI SP. M. Si

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP : 19690202 199803 2 010

Tembusan :

1. Bupati Jeneponto di Jeneponto
2. Arsip



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Rahmiati

Nim : 105711104320

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	8 %	10 %
2	Bab 2	25 %	25 %
3	Bab 3	8 %	10 %
4	Bab 4	7 %	10 %
5	Bab 5	4%	5%

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 14 Mei 2024

Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,


NurSinal, S.Hum.,M.I.P.
NBM. 964 591

Lampiran 9. Biografi Penulis

Biografi Penulis



Rahmiati atau yang biasa di panggil Mimi, Lahir di Bontoala Pada tanggal 31 Desember 2002, anak ke 2 dari 3 bersaudara. Dari pasangan Bapak Sumanto dan ibu Cuma. Penulis pertama kali masuk pendidikan di SDN MIN 1 Pattiro lulus pada tahun 2013 pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke MTS Negeri 3 Jeneponto dan tamat pada tahun 2016.pada tahun yang sama, Penulis melanjutkan pendidikan ke SMAN 4 Jeneponto dan tamat pada tahun 2019. Dan pada tahun 2020 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Program S1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Makssar.

Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha. Penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **“EFEKTIVITAS KEBIJAKAN DANA DESA DALAM PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAN INFRASTRUKTUR DESA PATTIRO KECAMATAN BANGKALA BARAT KABUPATEN JENEPONTO”**